BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2024-2044

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;

b. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kuningan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan perlu menetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;

c. bahwa guna memberikan perlindungan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2044

BAB I
KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Daerah Tahun 2024-2044 yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agara serta lingkungan penduduk setempat.
8. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat.

14. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
15. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mangatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
22. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan kelarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
23. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
24. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tempung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
25. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
26. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

27. Daya Dukung Alam adalah kemampuan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perkehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
28. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup manusia untuk memenuhi perkehidupan penduduk.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman terhadap strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah; dan
b. sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan emampuan masyarakat setempat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi:
a. pengendalian kuantitas Penduduk;
b. peningkatan Kualitas Penduduk;
c. pembangunan Keluarga;
d. penataan mobilitas Penduduk; dan
e. pembangunan data dan Administrasi Kependudukan.

BAB IV
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUUDUKAN

Pasal 5

(1) GDPK Tahun 2024-2044 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    a. pendahuluan;
    b. keadaan umum Daerah;
    c. kondisi pembangunan kependudukan Daerah;
    d. arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan Daerah;
    e. *roadmap* kebijakan pembangunan kependudukan Daerah; dan
    f. penutup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika GDPK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

(1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan GDPK di Daerah.
(2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK di Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Daerah.
(3) Pembentukan Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk Kelompok Kerja.
(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kelompok kerja bidang pengendalian penduduk;
    b. kelompok kerja bidang keluarga sejahtera;
    c. kelompok kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
    d. kelompok kerja bidang keluarga berencana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,

ACUS TOYIB

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN
TAHUN 2024-2044

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KUNINGAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan manusia (human development) merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan, oleh sebab itu menciptakan manusia berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global adalah sebuah keharusan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Pembangunan akan berhasil apabila didasarkan pada kebijakan pembangunan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, artinya penduduk yang berkualitas akan menunjang pembangunan secara optimal. Pembangunan manusia seutuhnya pada hakekatnya merupakan upaya untuk membangun penduduk khususnya warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan.

Upaya peningkatan kualitas penduduk, sangat dipengaruhi oleh jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, dan mobilitas. Dengan kata lain, pembangunan kualitas penduduk berkaitan dengan kuantitas dan mobilitas penduduk. Besarnya jumlah penduduk memberikan konsekuensi terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas dasar penduduk seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas sosial lainnya. Sementara di sisi lain persebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada kesenjangan kualitas sumber daya manusia baik perkotaan maupun pedesaan.

Dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan suatu kondisi dimana kuantitas penduduk dapat terkendali dengan persebaran yang merata. Upaya pengendalian kuantitas penduduk dilakukan dengan menekan angka kelahiran yakni dengan pengaturan jumlah dan

jarak kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi, penundaan usia perkawinan dan peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang dilaksanakan melalui program kependudukan dan keluarga berencana.

Dalam pelaksanaan upaya pengendalian kuantitas penduduk dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu disusun *Grand Design* dan strategi pengendalian kuantitas penduduk. *Grand Design* pengendalian kuantitas penduduk ini antara lain mencakup kebijakan, strategi serta program-program yang diperlukan serta sasaran dan arah dari pengendalian kuantitas kependudukan.

2. Dasar Hukum

Penyusunan *Grand Design* pengendalian kuantitas penduduk ini dilandasi beberapa dasar hukum :

a. Undang-Undang Dasar tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
d. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
f. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan.
g. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
h. Master Plan Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2030.
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 -2023.

3. Visi dan Misi

Visi Program KB Kabupaten Kuningan adalah Terwujudnya Keluarga Berkualitas Tahun 2025 dalam mendukung Kuningan Gemah ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG).

Dengan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas kesertaan ber KB masyarakat meliputi CPR (Contraseptive Prevalensi Rate), pemakaian MKJP, Menurunkan unmetneed di atas Standar Pelayanan Minimal.
2. Meningkatkan Advokasi/KIE/Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi kepada stake holder dan masyarakat.
3. Menyiapkan informasi KB dan data mikro keluarga yang akurat.
4. Meningkatkan kinerja petugas lapangan KB.
5. Meningkatkan kerja sama kemitraan lintas sektor dan lintas organisasi.
6. Meningkatkan penguatan jaringan kelembagaan institusi dan peran serta masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Ketahanan keluarga.

Kontribusi DPPKBP3A Kabupaten Kuningan terhadap Visi dan Misi Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045 adalah: “Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG) Tahun 2025” atau dalam mencapai visi akhir masyarakat yang tercantum dalam sasanti daerah yaitu “Rapih Winangun Kerta Raharja”.

- Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :

1. Mengembangakan SDM produktif yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa;
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan local;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
4. Meningkatkan keadilan , integritas dan kondusifitas daerah;

5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
7. Membangun dan mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas;
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Berangkat dari Visi yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (agenda pembangunan) terdiri atas:

1. Transformasi sosial, merupakan agenda untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Transformasi ekonomi, merupakan agenda untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, Ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, parawisata ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Tranfomasi tata kelola merupakan agenda untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, merupakan agenda untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan agenda untuk memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu

menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga berkelanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan merupakan agenda untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supreMisi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan agenda untuk pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesinambungan pembangunan merupakan agenda untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaannya efektif serta pembiayaan pembangunan.

Adapun kontribusi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap Visi dan Misi Kabupaten Kuningan adalah ;

- Pada Misi 3.

Sementara secara khusus Visi Kependudukan Kabupaten Kuningan adalah : “Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, juga dengan kondisi perkembangan sosial dan budaya masyarakat”.

Sedangkan Misi Kependudukan meliputi :

1. Membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (prime stakeholders) tentang pentingnya

pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan.

2. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan atau regulasi yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk.

4. Tujuan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk

Penyusunan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk ini antara lain ditujukan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Kuningan .
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Roadmap pengendalian kuantitas penduduk.
3. Menjadi acuan pemerintah daerah serta lembaga pemerintahan lainnya dalam perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan.

5. Sasaran

a. Pengendalian dan pengelolaan kuantitas penduduk;
b. Peningkatan kualitas penduduk dalam rangka pembangunan berkelanjutan untuk mencapai Kabupaten Kuningan termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing;
c. Pembangunan keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
e. Penataan administrasi kependudukan berbasis IT, akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

6. Ruang Lingkup

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kuningan ini, mencakup gambaran tentang ciri-ciri kependudukan Kabupaten Kuningan dengan segala aspek yang terkait didalamnya baik kondisi terkini dan yang akan datang, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, yang meliputi :

1. Kuantitas penduduk, meliputi jumlah dan sebaran penduduk, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah dan proporsi penduduk menurut

status kawin, keluarga, penduduk menurut karakteristik sosial, kelahiran, dan kematian;

2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya;
3. Pembangunan Keluarga, meliputi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan nilai-nilai agama;
4. Mobilitas dan persebaran penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi, distribus dan pemerataan penduduk;
5. Sistem Informasi kependudukan.

7. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam pembuatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang bersumber pada data sekunder.

8. Sumber Data

Dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sumber data merupakan bagian paling penting sehingga dalam hal ini *Grand Design* Pembangunan Kependudukan mengambil data dari Kabupaten Kuningan Dalam Angka, Susenas, BPS RI, BPS Kabupaten Kuningan, SDKI, dan data dari dinas terkait.

9. Pengertian Umum

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
3. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

4. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
5. Pembangunan Keluarga adalah Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-niai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antarangota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampiung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus menurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang struktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas Administrasi Daerah Tingkat II.
15. Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal tertentu (Sunaryo Urip-BPS).
16. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
17. Penyebaran Penduduk adalah upaya mengubah sebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamt, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

22. Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi andministrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
24. Data adalah fakta yang ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam bentuk media.
25. Sumber data adalah segala sesuatu tentang fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau rekam kedalam berbagai bentuk media oleh instansi/lembaga.
26. Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam jangka waktu satu generasi atau selama masa subur.
27. Kematian atau Mortalitas adalah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk.
28. Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan masa reproduksinya.
29. Ratio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki–laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu.
30. Perkembangan Kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
31. Mobilitas Penduduk adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
32. Mobilitas penduduk permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (Migran Internal) atau batas politik/negara (Migran Internasional).

33. Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif.
34. Migrasi Kembali adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan senssus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda.
35. Migrasi seumur hidup adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya.
36. Migrasi risen adalah bentuk migrasi melewati batas administrasi (desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
37. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
38. Penduduk usia kerja angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
39. Angka partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
40. Angkatan Pengangguran adalah proporsi jumlah pengang guran terhadap angkatan kerja.
41. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk usia 64 tahun keatas.
42. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memper hitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
43. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
44. Angka Kematian bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengan periode yang sama.
45. Angka Kematian Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang

lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena keha milannya atau pengelolaannya.

46. Angka partisipasi total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu 7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 tahun.
47. Angka partisipasi murni adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun,jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
48. Angka partisipasi kasar adalah persentase jumlah peserta didik SD, jumlah peserta didik SLTP, jumlah peserta didik SLTA, jumlah peserta didik PTN/PTS dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia masing-masing jenjang pendidikan (SD usia 7-12 tahun, SLTP usia 13–15 tahun, SLTA usia 16-18 tahun, PTN/PTS usia 19–24 tahun).

10. Kedudukan

Grand Design terdiri atas dua kata yakni (1) grand yang berarti hal yang paling penting, besar, menjadi induk, serta (2) design yang berarti suatu skema pengaturan (sinonim dari designing), sesuatu yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu lainnya (sinonim dari blueprint), suatu anticipated outcome yang ingin dicapai (sinonim dari aim). Secara praktikal, *Grand Design* kerap diterjemahkan/ diimplementasikan sebagai rencana induk atau kerangka utama. Memberi arah kebijakan, pedoman Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, sebagai rujukan dalam penyusunan roadmap pembangunan merupakan sejumlah ciri *Grand Design* yang telah berjalan selama ini.

Sebagai sebuah rencana induk maka *Grand Design* merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (roadmap); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka *Grand Design* merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, sub-kegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.

Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu *Grand Design* juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka *Grand Design* diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden) dan penajaman dari RPJPN.

Gambar 1.1
Bagan Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

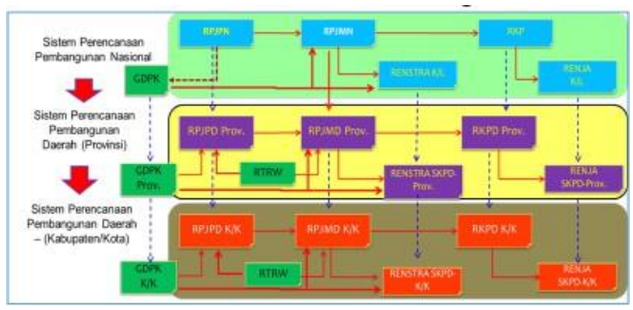

Adapun roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen Roadmap Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui Roadmap Pembangunan Kependudukan. Terkait dengan penyiapan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktikal, Roadmap Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan.

RPJMN/RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Daerah. Kedudukan *Grand Design* dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Gambar 1.2
Bagan Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

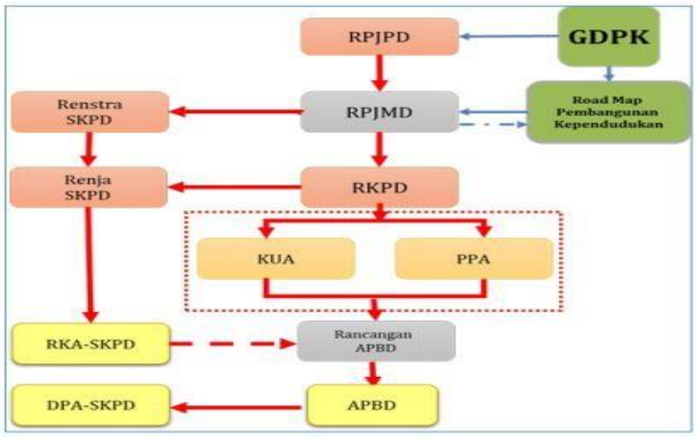

Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiraan sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD (sehingga digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), Roadmap Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Hal yang harus dipahami dan betul-betul diperhatikan oleh tim penyusun GDPK 5 Pilar adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangka isu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan. Mengingat kedudukan GDPK 5 Pilar sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, apabila antar wilayah tidak mempunyai keterkaitan maka tidak bisa disebut sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

Gambar 1.3
Bagan Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah

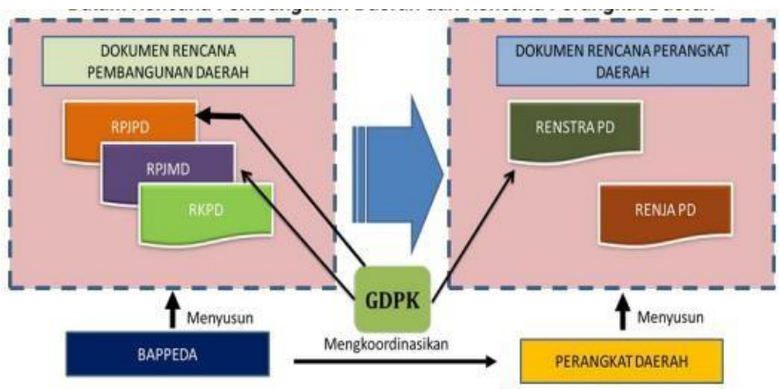

(Pasal 11 Permendagri 86/2017)

Oleh karena itu, setiap jenjang (nasional,provinsi,dan kabupaten) dalam menyusun GDPK 5 pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada dilingkup atas maupun dibawahnya secara berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Karena nantinya GDPK 5 Pilar nasional merupakan gambaran besar dari GDPK 5 Pilar seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota, GDPK 5 Pilar Provinsi merupakan gambaran besar GDPK 5 Pilar seluruh Kabupaten/ Kota diwilayahnya serta dalam menentukan strategi dan kebijakan mengacu pada strategi nasional, sedangkan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang

muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Dengan keterpautan inilah maka GDPK 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.

Gambar 1.4
Bagan Kependudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah

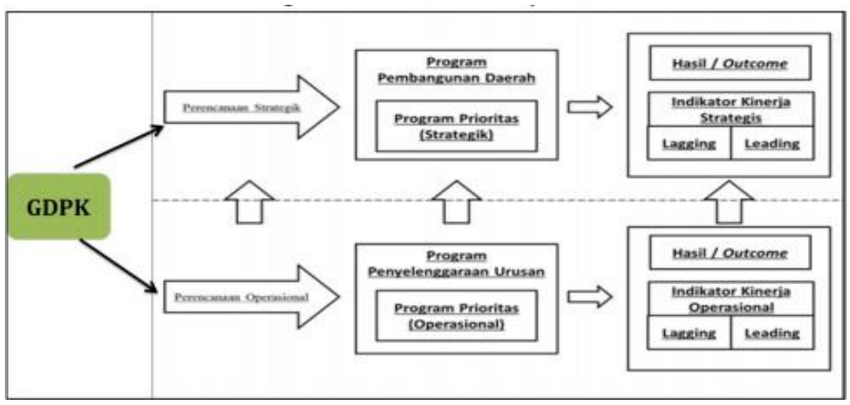

11. Pendekatan Pengembangan GDPK

Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang bersumber pada data Sekunder. Dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sumber data merupakan bagian paling penting sehingga dalam hal ini *Grand Design* Pembangunan Kependudukan mengambil data dari DPPKBP3A, Disdukcapil, Dinkes, Disnaker, Disdik, Kemenag, BPS dan data dari dinas terkait lainnya.

Berdasarkan kedudukan *Grand Design* terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Selain itu dapat ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai pedoman terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang, dll). Selain itu dapat pula ditemui fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor dan agency internasional yang secara independen mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat bidang pembangunan kependudukan, meskipun tanpa merujuk pada dokumen kebijakan pembangunan pemerintah di bidang kependudukan. Pada sisi

yang lain juga penting kiranya melihat sejumlah program pembangunan di bidang kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dibidang kependudukan.

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil gap/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan pembangunan kependudukan kemudian memunculkan strategi formulasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan menjadi 3 jalur yakni:

a. kajian dokumen kebijakan,
b. kajian program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan,
c. kajian akademik.

Sebagaimana tertera pada gambar 1-2, proses formulasi tersebut dimulai melalui kajian dokumen kebijakan yang diarahkan guna menelaah dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan sehingga isu, visi, dan strategi bidang pembangunan kependudukan, yang akan menjadi sumber derivasi, dapat teridentifikasi.

Selanjutnya, kajian program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dikaji untuk mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan bidang kependudukan yang telah dideksripsikan dalam dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan.

Pada sisi lain, kajian akademik dibangun untuk :

a. Mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan, serta
b. Memberi alur logika yang koheren atas derivasi ditingkat dokumen *Grand Design*, sehigga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis gap). Sementara visi

dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan forum konsultasi/Focussed Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. FGD dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 pilar.

Gambar 1.5
Bagan Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi GDPK

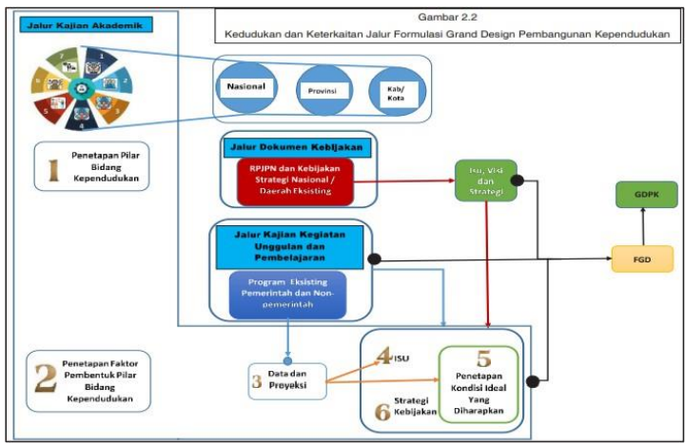

Penerapan langkah-langkah yang sistematis dan terencana dengan baik seperti yang tersampaikan dalam uraian dan bagan alir diharapkan tersusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang komprehensif dan akurat.

B. KEADAAN UMUM DAERAH

1. Letak Geografis

Lingkup wilayah perencanaan adalah wilayah administratif dalam Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dengan luas 117.851,55 ha atau 117,85 km^{2}yang terletak pada titik koordinat 108°23' - 108°47' bujur timur dan 6°47' - 7°12' lintang selatan dengan topografi relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian Barat dan bagian Selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut, sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian Timur dengan ketinggian antara 120 meter sampai dengan 222 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, 361 desa, 15 kelurahan, 33 lingkungan, 1.187 Dusun, 1.745 Rukun Warga dan 5.675 Rukun Tetangga. Secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon
- Sebelah Timur : Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Gambar 2.1
Wilayah Administratif Kabupaten Kuningan

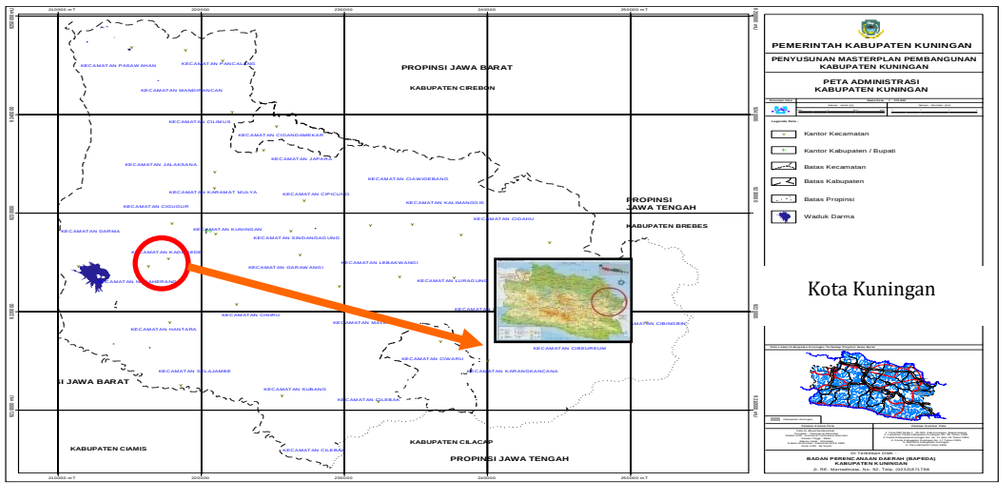

Luas Wilayah : 119.252

Sumber : - Peta RBI skala 1 : 25.000 Kabupaten Kuningan, Bakosurtanal
- Lampiran Perda Kabupaten Kuningan No.28 tahun 2000
- Perda Kabupaten Kuningan No.17 tahun 2005
- Bapeda Kabupaten Kuningan
- Citra Ekonos Kabupaten Kuningan 2006

Kabupaten Kuningan yang terletak di Kawasan Gunung Terbesar di Jawa Barat yaitu Gunung Ciremai sehingga berpengaruh pada Temperatur suhu Udara Kabupaten Kuningan rata-rata 28 derajat Celcius suhu maksimum 34 dan suhu minimum 23, dan mempunyai rata-rata curah hujan maksimum 16,48 mm dan minimum 0,10 mm, sehingga secara umum Kabupaten Kuningan mempunyai kondisi udara yang sejuk. Kabupaten Kuningan memiliki luas 37,173.97 km2 yang menyebar di 32 Kecamatan dan 376 Desa. Pembagian wilayah Kabupaten Kuningan tersebut tergambar dalam Gambar dibawah ini :

Gambar 2.2
Pembagian Wilayah Kabupaten Kuningan

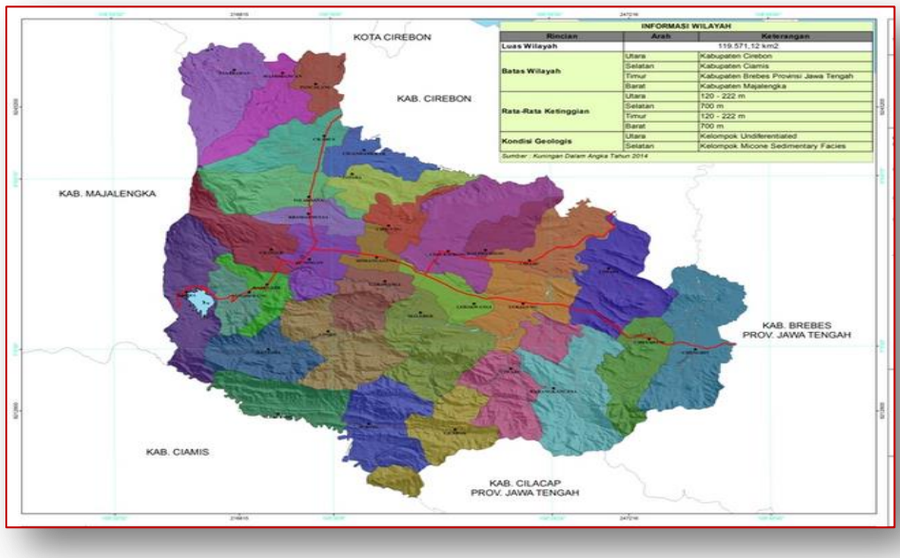

2. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/Kecamatan Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Dimana pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain jumlah penduduk akan di kurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah

penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu ferilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/out migration). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ciawigebang	6.040,81	5,06%
2	Cibeureum	3.919,78	3,28%
3	Cibingbin	6.972,51	5,84%
4	Cidahu	3.704,72	3,10%
5	Cigandamekar	2.242,54	1,88%
6	Cigugur	3.529,15	2,96%
7	Cilebak	4.268,78	3,57%
8	Cilimus	3.529,69	2,96%
9	Cimahi	5.838,75	4,89%
10	Ciniru	4.976,49	4,17%
11	Cipicung	1.902,09	1,59%
12	Ciwaru	5.197,64	4,35%
13	Darma	5.449,36	4,56%
14	Garawangi	2.984,57	2,50%
15	Hantara	3.537,40	2,96%
16	Jalaksana	3.920,57	3,28%
17	Japara	2.707,49	2,27%
18	Kadugede	1.810,55	1,52%
19	Kalimanggis	2.017,75	1,69%
20	Karangkancana	6.529,53	5,47%
21	Kramatmulya	1.687,29	1,41%
22	Kuningan	2.994,24	2,51%
23	Lebakwangi	1.969,69	1,65%
24	Luragung	4.073,77	3,41%
25	Maleber	5.736,20	4,80%
26	Mandirancan	3.500,00	2,93%
27	Nusaherang	1.809,45	1,52%
28	Pancalang	1.919,88	1,61%
29	Pasawahan	4.927,49	4,13%
30	Selajambe	3.661,44	3,07%
31	Sindangagung	1.300,91	1,09%
32	Subang	4.748,84	3,98%
Jumlah		119.344,83	100,00%

Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan

3. Kondisi Topografi dan Morfologi

Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain, meliputi planet, satelit alami (bulan dan sejenisnya), serta asteroid. Salah satu yang dikaji dalam topografi yaitu mengenai elevasi atau ketinggian suatu wilayah. Ketinggian pada suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 2.000 mdpl. 2.000 – 3.000 mdpl dan > 3000 mdpl. Luasan wilayah berdasarkan ketinggian disajikan Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luasan Wilayah berdasarkan Topografi

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
1	0 – 500 mdpl	80.054,41	67,08
2	500 - 1.000 mdpl	32.011.42	26,82
3	1.000 – 2.000 mdpl	6.192,74	5,19
4	2.000 – 3.000 mdpl	1.078,13	0,90
5	>3000 mdpl	8,12	0,01
	Jumlah	119.409,31	100,00

Sumber : Revisi RTRW Kabupten Kuningan

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa morfologi daerah terdiri atas datar, landai, berombak, berbukit, bergelombang dan bergunung. Secara keseluruhan morfologi berbukit merupakan yang terluas yaitu sebesar 46.004,62 hektar, sedangkan luasan yang terkecil berada di wilayah morfologi datar seluas 3.925,48 hektar.

Tabel 2.4
Luas Kemiringan Tanah Kabupaten Kuningan

No	Kemiringan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	0 – 8	61.803,849	51,69
2	8 – 15	24.924,035	20,84
3	15 – 25	18.437,778	15,42
4	25 – 40	10.583,776	8,85
5	> 40	3.821,682	3,20

Sebagian besar tekstur tanah termasuk kedalaman tekstur sedang dan sebagian kecil termasuk tekstur halus. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepekaan yang rendah dan sebagian kecil sangat tinggi terhadap erosi.

Tingkat kepekaan terhadap erosi disebabkan ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan kemampuannya sehingga berakibat rusaknya proses fisika, kimia dan biologi tanah tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya intensitas tingkat kepekatan terhadap terhadap erosi adalah faktor : lereng, sistem penggarapan, pengolahan tanah, jenis tanah dan prosentase penutup tanah.

Tingkat kepekaan erosi di Kabupaten Kuningan diklasifikasikan menjadi lima kelas, yaitu :

- Sangat Peka : 14.258,42 Ha
- Peka : 17.568,96 Ha
- Agak Peka : 20.473,43 Ha
- Kurang Peka : 21.845,69 Ha
- Tidak Peka : 36.307,00 Ha

4. Gambaran Ekonomi Daerah

   Potensi Unggulan Daerah

   a. Pertanian, Perikanan dan Peternakan

      1). Merupakan wilayah agropolitan yang dibuktikan dengan pangsa (*share*) terbesarnya berasal dari sektor pertanian yang memiliki kesempatan kerja, produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian yang relatif tinggi sebagai implikasi dari tingginya tingkat penerapan teknologi; serta didominasi oleh unit-unit kegiatan basis yang sebagian besar produknya dipasarkan ke luar daerah (ekspor regional);

      2). *Core business* yang membentuk struktur perekonomian terbesar dan mendongkrak pendapatan regionalnya adalah sektor pertanian;

      3). Keanekaragaman di sektor pertanian dan sub sektornya, berpotensi untuk dikembangkan, bahkan mengalami surplus di beberapa kecamatan yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan tiap penduduknya maupun dapat diekspor ke wilayah lain;

      4). Arah Pengembangan Distrik Pengembangan Agropolitan:

         - Distrik Kuningan: Sentra produksi sapi perah, rempah-rempah, hortikultura dan perikanansebagai pusat aneka makanan olahan dan merupakan daerah pengembangan argoindustri melalui optimalisasi aset-aset yang sudah ada.

- Distrik Cilimus: Sentra produksi ubi jalar, domba, ikan, melinjo dan madu serta pengembangan industri berbasis komoditi unggulan melalui pengembangan kerjasama yang menguntungkan antara petani dan industri.
- Distrik Ciawigebang: Sentra produksi bawang merah, ubi kayu, buah-buahan, ayam ras, dan pusat perdagangan buah-buahan di Kab.Kuningan, serta pengembangan industribawang goreng dan sirop jeruk nipis melalui pengembangan kerjasama yang menguntungkan antara petani dan industri.
- Distrik Luragung: Sebagai distrik yang unggul dalam pengembangan sapi potong dan aren serta pengembangan industri tape ketan melalui penyediaan bahan baku dari local.

Tabel 2.5
Produksi Tanaman Pangan

No	Tanaman Pangan	Ton
1	Padi	350.322
2	Jagung	5.290
3	Kedelai	498
4	Kacang Tanah	157
5	Kacang Hijau	5
6	Ubi Kayu	6.481
7	Ubi Jalar	108.496

Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2024

Luas areal tanaman perkebunan menurut jenis tanaman dan produksi ditampilkan Tabel berikut :

Tabel 2.6
Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Tahun 2023

No	Tanaman Perkebunan	Luas (Ha)	Ton
1	Kelapa	4.146,50	3.178,36
2	Kopi	1.572,32	496,88

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2024

Perkebunan utama didominasi tanaman kelapa dan kopi, hasil dari perkebunan kopi merupakan primadona baru yang menjadi peluang bagi pengembangan sektor

ini. Potensi kawasan hutan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	25.066,82
2	Taman Nasional	8.837,02
3	Taman Wisata Alam	8,90
4	Hutan Hak/Hutan Rakyat	18.418,73
5	Hutan Kota	71,50
6	Taman Keanekaragaman Hayati	4,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2024
Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait

Tabel di atas tidak terbatas pada kawasan hutan yang dimiliki negara, akan tetapi terdapat juga hutan yang menjadi kewenangan daerah seperti hutan kota dan Taman Kehati yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai hasil hutan yang diproduksi hutan produksi dan hutan hak/hutan rakyat antara lain kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kuningan Dalam Angka Tahun 2022).

Dari luasan hutan yang dimiliki, berdasarkan data BPS tahun 2023, dapat memperoleh hasil hutan berupa kayu bulat sebanyak 5.321,21 M^2 namun hasil hutan ini merupakan barang mentah tanpa menghasilkan barang olahan dari kayu sehingga ini dapat menjadi potensi untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan produksi hasil hutan.

Berdasarkan buku Kuningan Dalam Angka Tahun 2024, produksi perikanan tangkap pada Tahun 2023 mencapai 404,80 ton dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap paling banyak terdapat di Kecamatan Darma, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Kuningan.

Terdapat berbagai jenis komoditas ternak sebagaimana diperlihatkan tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Jumlah Komoditas Ternak

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Ternak Besar	
	a. Sapi Potong	28.240
	b. Sapi Perah	6.582
	c. Kerbau	4.904
	d. Kuda	379
2	Ternak Kecil	
	a. Domba	123.757
	b. Kambing	9.099
	c. Kelinci	7.847
	d. Babi	1.256
3	Ternak Unggas	
	a. Ayam Buras	562.514
	b. Ayam Ras Petelur	2.231.239
	c. Ayam Ras Pedaging	3.326.380
	d. Puyuh	136.697
	e. Itik	88.894
	f. Itik Manila/Entog	19.619

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2024

Berdsarkan data produksi pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa potensi yang dimiliki cukup besar untuk terus dikembangkan dalam upaya mendorong pertumbuhan PDRB sektor tersebut.

b. Pariwisata

1). Memiliki banyak objek dan daya tarik wisata yang beragam, sehingga kegiatan pariwisata ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian;

2). Potensi besar objek pariwisata untuk dikembangkan yang terlokalisasi dalam satu wilayah di bagian barat, sehingga bila dijadikan tourisme-lingkage akan sangat aktraktif dan menarik. Hal ini didukung oleh jumlah dan persebaran hotel dan penginapan serta fasilitas yang disediakan, sehingga perlu adanya jalan lintas penghubung untuk mempermudah akses antar lintas wisata;

3). Terpusatnya beberapa obyek dan daya tarik wisata pada satu bagian wilayah memudahkan pelaku wisata

melakukan kunjungan dan memberikan multiplier effect bagi kegiatan penunjangnya.

Tabel 2.9
Sarana Prasarana Pendukung Sektor Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Pariwisata
Tahun 2019-2023

No	Sarana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hotel Berbintang					
	4	0	0	0	0	1
	3	3	3	3	3	4
	2	2	2	2	2	1
	1	1	1	1	1	2
	Hotel Non Bintang	136	126	131	154	155
	Restoran/Rumah Makan	99	63	70	71	85
	Kunjungan Wisata (orang)	4.735.408	2.480.718	2.668.442	3.448.917	2.785.126

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan,2023

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang paling banyak digunakan untuk menilai pembangunan ekonomi suatu daerah. Para penyelenggara atau pelaksana pembangunan seringkali menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi untuk mengevaluasi dan menganalisis perkembangan pembangunan ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan satu-satunya indikator ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat karena indikator ini hanya menunjukkan pertumbuhan perekonomian secara agregat tanpa melihat bagian penduduk mana yang menikmati pertumbuhan tersebut.

Kinerja suatu perekonomian dicerminkan oleh semakin meningkatnya produktivitas dari kegiatan ekonomi. Kinerja ini hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan, karena dalam perhitungan ini faktor harga barang dan jasa sudah dihilangkan atau dianggap konstan/sama dengan tahun dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi

yang muncul dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat mencerminkan naik/turunnya produksi suatu daerah.

Perekonomian daerah ditunjukkan antara lain dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). PDRB atas dasar harga konstan 2010 daerah Tahun 2019 hingga Tahun 2022 cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB mencapai Rp 16.864,15 Milyar dan meningkat hingga Rp 18.450,34 Milyar pada tahun 2019 dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,59 persen. PDRB terkoreksi cukup tajam pada Tahun 2020, akibat terdampak Pandemi Covid-19, di tahun itu PDRB terkoreksi menjadi Rp 16.882,76 Milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,11 persen. Seiring pemulihan ekonomi PDRB kembali bergerak naik, hingga Tahun 2023 PDRB bergerak naik menjadi Rp. 19.418,73 Milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,25 persen.

Pertumbuhan ekonomi per tahun diukur melalui perbedaan PDRB pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya yang dirasiokan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Adapun struktur dan laju pertumbuhan ekonomi daerah ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
Struktur Perekonomian Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	20,99	21,27	21,02	20,67	20,05
2	Pertambangan dan penggalian	1,33	1,29	1,40	1,32	1,27
3	Industri pengolahan	2,43	2,47	2,46	2,46	2,45
4	Pengadaan listrik dan gas	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
6	Konstruksi	9,16	8,49	8,78	8,56	8,55
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	16,24	15,73	15,74	15,52	15,36

8	Transportasi dan pergudangan	13,78	13,55	13,12	13,98	14,61
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,90	1,82	1,78	1,90	1,93
10	Informasi dan komunikasi	5,45	6,77	7,00	7,07	7,22
11	Jasa keuangan dan asuransi	5,08	5,09	5,17	4,85	4,82
12	Real estat	3,28	3,29	3,54	3,54	3,58
13	Jasa perusahaan	0,46	0,45	0,47	0,50	0,51
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	3,33	3,20	3,04	2,85	2,77
15	Jasa pendidikan	10,75	10,92	10,85	10,95	10,97
16	Jasa kesehatan dan kegiatan	1,80	1,73	1,80	1,81	1,80
17	Jasa lainnya	3,85	3,74	3,64	3,84	3,92
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2023

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,77	1,44	2,34	3,74	2,14
2	Pertambangan dan penggalian	-2,57	-2,70	12,75	-0,66	1,01
3	Industri pengolahan	9,29	1,07	3,34	5,54	4,63
4	Pengadaan listrik dan gas	3,74	-1,99	13,34	3,56	3,07
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,21	8,85	6,39	2,79	2,87
6	Konstruksi	6,26	-7,15	7,02	2,95	5,09
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	7,72	-3,00	3,58	4,07	4,17
8	Transportasi dan pergudangan	6,06	-1,51	0,24	12,50	9,99
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,97	-3,82	1,10	12,44	6,95
10	Informasi dan komunikasi	9,20	24,27	7,09	6,64	7,46
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,89	0,47	5,08	-1,01	4,66
12	Real estat	9,07	0,34	11,45	5,60	6,45
13	Jasa perusahaan	8,78	-2,83	9,21	11,68	6,89
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	4,57	-3,79	-1,60	-1,19	2,54
15	Jasa pendidikan	8,98	1,69	2,90	6,51	5,44
16	Jasa kesehatan dan kegiatan	8,90	-3,26	7,52	6,00	4,97
17	Jasa lainnya	7,73	-2,83	0,89	11,20	7,51
Laju PDRB (LPE)		**6,59**	**0,11**	**3,56**	**5,53**	**5,25**

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2023

C. KONDISI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

1. Kuantitas Penduduk

a. Komposisi dan Persebaran Penduduk

Kuantitas penduduk dibagi menjadi komposisi dan persebaran penduduk. Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, seperti kelompok umur, karakteristik sosial ekonomi dan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya. Pengelompokkan ini berguna untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya; mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan, menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan; membandingkan suatu keadaan penduduk dengan keadaan penduduk lainnya; mengetahui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

b. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 1.201.764 jiwa (Laki- laki: 608.669 jiwa, perempuan: 593.095 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,05%. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 tercatat 1.006,42 jiwa per km^2.

Komposisi penduduk menurut umur tergolong kedalam piramida *expansive* atau piramida penduduk muda, sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Tahun 2020-2023

INDIKATOR		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
Demografi					
1.	Jumlah Penduduk	1.167.686	1.180.391	1.196.017	1.201.764
	a. Laki-laki	592.009	598.254	605.970	608.669
	b. Perempuan	575.677	582.137	590.047	593.095
	c. Rasio	102,84	102,77	102,70	102,63
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	978	989	1,002	1.006,42
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,17	1,09	1,32	1,05
4.	Jumlah Rumah Tangga	277.855	301.470	305.336	309.121
5.	Jumlah Penduduk menurut Kelompokumur (jiwa)				

	a. 0-14	277.965	276.433	275.713	276.989
	b. 15-64	798.083	806.294	816.115	821.316
	c. 65+	91.638	97.664	74.347	103.459
6.	Angka Beban Tanggungan (ABT)	46,31	46,40	46,55	46,32

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

Dari data di atas, pada tahun 2023 komposisi penduduk menurut kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda (<15 tahun) berjumlah 276.989 jiwa; kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 821.316 jiwa dan kelompok umur lanjut usia (>65 tahun) berjumlah 103.459 jiwa.

2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi, karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin.

a. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut umur dapat dikelompokkan dalam kelompok umur tunggal, kelompok uur lima tahunan, ataupun dikelompokkan berdasarkan distribusi tertentu misalnya pengelompokkan berdasarkan usia sekolah (SD 7-12 tahun), SMP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun dan perguruan tinggi 19-24 tahun). Selain pengelompokkan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokkan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu :

a) Penduduk usia muda umur 0-14 tahun
b) Penduduk usia produktif umur 15-64 tahun, dan
c) Penduduk usia lanjut umur 65 tahun ke atas

Sedangkan berdasarkan umur median, penduduk di suatu daerah dibagi dalam tiga katagori yaitu :

1. Penduduk muda jika umur median <20 tahun
2. Penduduk intermediate jika umur median antara 20-30 tahun,
3. Penduduk tua jika umur median lebih dari 30 tahun.

Grafik 3.1
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

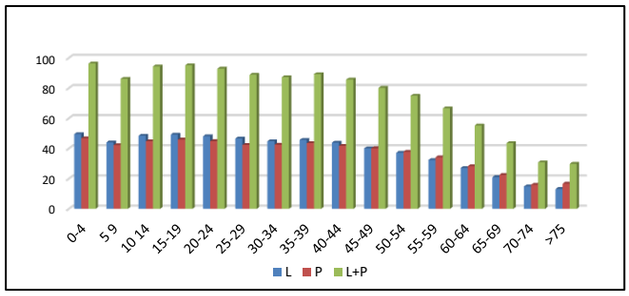

Sumber : DPPKBP3A Kab. Kuningan, Tahun 2023

3. Piramida Penduduk

Proyeksi pertumbuhan penduduk juga diperlukan untuk memetakan peluang dan tantangan pembangunan dari waktu ke waktu. Penduduk Daerah Tahun 2023 sebanyak 1.201.764 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 608.669 jiwa dan perempuan sebanyak 593.095 jiwa (BPS Kabupaten Kuningan, 2024). Piramida penduduk Daerah mencerminkan bentuk piramida penduduk dewasa (stasioner). Piramida ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk relatif stabil, dimana angka kematian dengan angka kelahiran cenderung seimbang dan penduduk yang berumur tua hampir sebanding dengan penduduk muda.

Grafik 3.2
Piramida Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2023

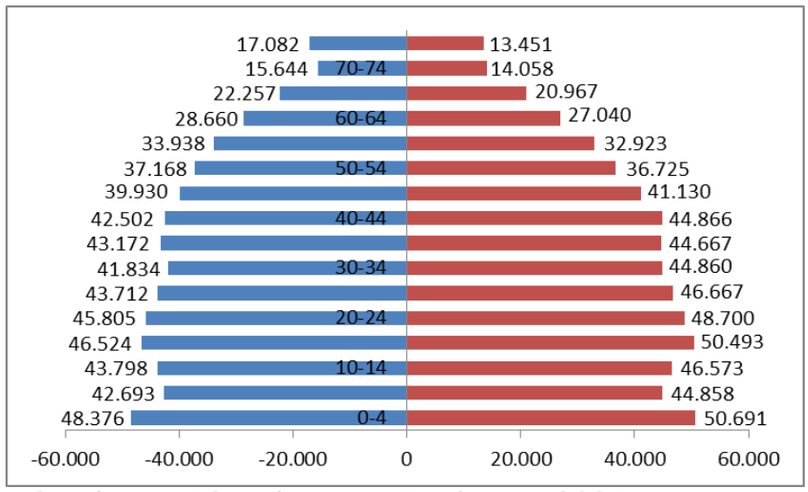

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2024

Proyeksi penduduk daerah Tahun 2025-2045 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.13
Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LPP (%)	SEX RATIO
2025	626.391	599.102	1.225.493	0,95	104,55
2030	661.967	617.465	1.279.432	0,87	107,21
2035	699.563	627.112	1.326.675	0,73	111,55
2040	739.294	625.426	1.364.720	0,57	118,21
2045	781.282	612.779	1.394.061	0,43	127,50

Sumber : BPS, dianalisis 2024

Data di atas menunjukan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk daerah diproyeksikan menurun setiap lima tahunnya dan jumlah penduduk laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sensus Penduduk tahun 2020 juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,49 persen pada 2010 menjadi 1,25 persen pada tahun 2020 (BPS, 2021). Perlambatan laju pertumbuhan penduduk ini harus dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif dan mendorong semakin menurunnya rasio ketergantungan sehingga bonus demografi dapat memberikan manfaat secara optimal.

a. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan diatas umur 65 tahun). Makin tingi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 3.1 menunjukan jumlah penduduk berdasarkan struktur umur.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Tahun 2023

INDIKATOR		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk menurut Kelompokumur (jiwa)				
	a. Umur Muda (0-14 Tahun)	277.965	276.433	275.713	276.989
	b. Umur Produktif (15-64 Tahun)	798.083	806.294	816.115	821.316
	c. Umur Tua (diatas 65 Tahun)	91.638	97.664	74.347	103.459

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

4. Komposisi Penduduk dan Keluarga

Informasi tentang jumlah penduduk dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dibagi dalam 2 tipe yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti (nuclear family) yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak anak yang belum kawin atau ibu dengan anak anak yang belum kawin. Sedangkan keluarga luas (extended family) yaitu keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, anak anak baik yang sudah kawin ataupun belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

a. Jumlah Anggota dan Rata Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Tabel 3.2
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

PERIODE : s.d 2023

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	STATUS PERKAWINAN							
			BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10	11=10/3*100
01	KADUGEDE	8,883	169	1.90	6,654	74.91	561	6.32	1,499	16.87
02	CINIRU	6,488	72	1.11	5,253	80.96	310	4.78	853	13.15
03	SUBANG	5,350	55	1.03	4,160	77.76	208	3.89	927	17.33
04	CIWARU	9,842	129	1.31	7,581	77.03	476	4.84	1,656	16.83
05	CIBINGBIN	13,059	190	1.45	9,976	76.39	651	4.99	2,242	17.17
06	LURAGUNG	14,637	224	1.53	10,830	73.99	829	5.66	2,754	18.82
07	LEBAKWANGI	14,761	329	2.23	10,916	73.95	914	6.19	2,602	17.63
08	GARAWANGI	13,362	241	1.80	10,070	75.36	830	6.21	2,221	16.62
09	KUNINGAN	30,751	657	2.14	22,708	73.84	2,137	6.95	5,249	17.07
10	CIAWIGEBANG	26,999	372	1.38	21,204	78.54	1,361	5.04	4,062	15.05
11	CIDAHU	14,001	237	1.69	10,529	75.20	943	6.74	2,292	16.37
12	JALAKSANA	15,333	318	2.07	11,453	74.70	934	6.09	2,628	17.14
13	CILIMUS	15,681	361	2.30	11,271	71.88	1,124	7.17	2,925	18.65
14	MANDIRANCAN	7,836	169	2.16	5,507	70.28	660	8.42	1,500	19.14
15	SELAJAMBE	4,457	47	1.05	3,529	79.18	178	3.99	703	15.77
16	KRAMATMULYA	14,422	275	1.91	10,807	74.93	1,000	6.93	2,340	16.23
17	DARMA	15,919	173	1.09	12,661	79.53	768	4.82	2,317	14.55
18	CIGUGUR	13,874	163	1.17	11,130	80.22	593	4.27	1,988	14.33
19	PASAWAHAN	7,936	156	1.97	5,773	72.74	587	7.40	1,420	17.89
20	NUSAHERANG	6,367	96	1.51	4,788	75.20	448	7.04	1,035	16.26

21	CIPICUNG	8,968	138	1.54	7,224	80.55	396	4.42	1,210	13.49
22	PANCALANG	8,044	170	2.11	5,971	74.23	460	5.72	1,443	17.94
23	JAPARA	7,199	77	1.07	5,892	81.84	330	4.58	900	12.50
24	CIMAHI	10,314	136	1.32	7,876	76.36	533	5.17	1,769	17.15
25	CILEBAK	3,878	17	0.44	3,218	82.98	119	3.07	524	13.51
26	HANTARA	4,820	37	0.77	3,808	79.00	250	5.19	725	15.04
27	KALIMANGGIS	8,223	149	1.81	6,116	74.38	566	6.88	1,392	16.93
28	CIBEUREUM	6,477	43	0.66	5,182	80.01	310	4.79	942	14.54
29	KARANG KANCANA	6,632	65	0.98	5,356	80.76	279	4.21	932	14.05
30	MALEBER	13,444	298	2.22	10,184	75.75	630	4.69	2,332	17.35
31	SINDANGAGUNG	12,169	265	2.18	9,166	75.32	699	5.74	2,039	16.76
32	CIGANDAMEKAR	10,001	195	1.95	7,676	76.75	533	5.33	1,597	15.97
JUMLAH TOTAL		360,127	6,023	1.67	274,469	76.21	20,617	5.72	59,018	16.39

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran, 2024

b. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lain.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya dimasa depan dan bagaimana gambaran social ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Tabel 3.3
Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki dan Perempuan menurut Kelompok Umur

PERIODE : s.d 2023

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	KK LAKI-LAKI	KK PEREMPUAN	KK TOTAL
1	2	3	4	5
01	KADUGEDE	7312	1571	8883
02	CINIRU	5651	837	6488
03	SUBANG	4479	871	5350
04	CIWARU	8268	1574	9842
05	CIBINGBIN	10950	2109	13059
06	LURAGUNG	11990	2647	14637
07	LEBAKWANGI	12177	2584	14761
08	GARAWANGI	11056	2306	13362
09	KUNINGAN	25065	5695	30760
10	CIAWIGEBANG	22886	4113	26999
11	CIDAHU	11488	2513	14001
12	JALAKSANA	12705	2628	15333
13	CILIMUS	12553	3128	15681
14	MANDIRANCAN	6135	1701	7836
15	SELAJAMBE	3810	647	4457
16	KRAMATMULYA	11887	2535	14422
17	DARMA	13568	2351	15919
18	CIGUGUR	11933	1941	13874
19	PASAWAHAN	6372	1564	7936
20	NUSAHERANG	5215	1152	6367
21	CIPICUNG	7736	1232	8968

22	PANCALANG	6589	1455	8044
23	JAPARA	6263	936	7199
24	CIMAHI	8621	1693	10314
25	CILEBAK	3389	489	3878
26	HANTARA	4105	715	4820
27	KALIMANGGIS	6733	1490	8223
28	CIBEUREUM	5520	957	6477
29	KARANG KANCANA	5778	854	6632
30	MALEBER	11155	2289	13444
31	SINDANGAGUNG	10056	2113	12169
32	CIGANDAMEKAR	8320	1681	10001
JUMLAH TOTAL		299765	60371	360136

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran, 2023

Di Kabupaten Kuningan sebagian besar kepala keluarga adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 299.765 jiwa. Hal ini menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Sekitar 80% keluarga di Kabupaten Kuningan, kepala keluarganya adalah berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan yaitu 20% seperti pada Tabel di atas. Berdasarkan persebaran kecamatan menurut jenis kelamin kepala keluarga dengan jenis kelamin perempuan tertinggi berada di Kecamatan Kuningan 5.695 KK. Keluarga di kecamatan ini diduga karena pasangan (suaminya) meninggal dunia ataupun cerai. Sementara keluarga yang dikepalai laki-laki terbanyak terdapat di Kecamatan Kuningan 25.065 KK.

4. Karakteristik Penduduk Kabupaten Kuningan Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Kuningan
Tahun 2023

PENDIDIKAN AKHIR	L	P
Tidak/ Belum Sekolah	11.61	11.29
Tidak Tamat SD	11,52	11.61
Tamat SD/Sederajat	35.29	38.35
SMP/MTS	16.57	16.39
SMA/SMK/MA	20.33	17.65
Akademi/Perguruan Tinggi	4.69	4.7
JUMLAH	**100**	**100**

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran, 2023

Data ini menggambarkan distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan mereka, mulai dari yang tidak/belum sekolah hingga yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi.

5. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi penduduk dapat dilihat dari kegiatan ekonomi keluarga maupun anggotanya serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Status pekerjaan penduduk diperlukan untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Dilihat dari kegiatan ekonomi, kepala keluarga di Kabupaten Kuningan adalah bekerja dengan jenis pekerjaan terbesar adalah sebagai wiraswasta, diikuti buruh harian lepas, petani/pekebun, mengurus rumah tangga, karyawan swasta, buruh tani/perkebunan, pegawai negeri sipil, pensiunan, belum/tidak bekerja, dan perdagangan.

Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang mengurus rumah tangga ke 4(empat) terbesar dan belum/tidak bekerja ke 9 (sembilan) terbesar, Kepala keluarga yang mengurus rumah tangga dan tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya kepala keluarga tersebut memiliki status ekonomi yang rendah. Karena bagaimana mereka dapat

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka diduga tidak mempunyai penghasilan, sehingga pemerintah Kabupaten Kuningan perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk yang Merupakan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan
Tahun 2021-2023

Angkatan Kerja	Angkatan Kerja (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	348.835	346.836	382.883	193.947	183.989	191.286	542.782	530.825	574.169
Bekerja	309.240	308.114	345.408	170.165	170.636	174.250	479.405	478.750	519.658
Pengangguran Terbuka	39.595	38.722	37.475	23.782	13.353	17.036	63.377	52.075	54.511

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan pada tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2022. Jumlah Angkatan Kerja meningkat dari tahun 2022 (530.825 jiwa) menjadi 574.169 jiwa pada tahun 2023. Jumlah orang yang bekerja juga mengalami peningkatan dari 478.750 jiwa pada tahun 2022 menjadi 519.658 jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka sedikit meningkat dari 52.075 jiwa pada tahun 2022 menjadi 54.511 jiwa pada tahun 2023. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Kuningan tetap menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia masih belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar.

6. Keluarga Berencana

Salah satu ciri keberhasilan program keluarga berencana adalah banyaknya pastisipasi masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur menggunakan alat kontrasepsi, standar Nasional menyepakati 65 % peserta KB dari seluruh PUS sudah menunjukkan angka yang baik karena bisa menekan laju kelahiran pertahunnya. Secara Umum Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak

melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat.

Salah satu indikator program KB yaitu penggunaan KB saat ini dan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) atau CU/PUS. CPR adalah persentase penggunaan alat/cara KB oleh pasangan usia subur (PUS) yaitu WUS (umur 15-49 tahun) berstatus menikah. Sampai dengan bulan Desember 2023.

Grafik 3.3
Indikator CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
Tahun 2023

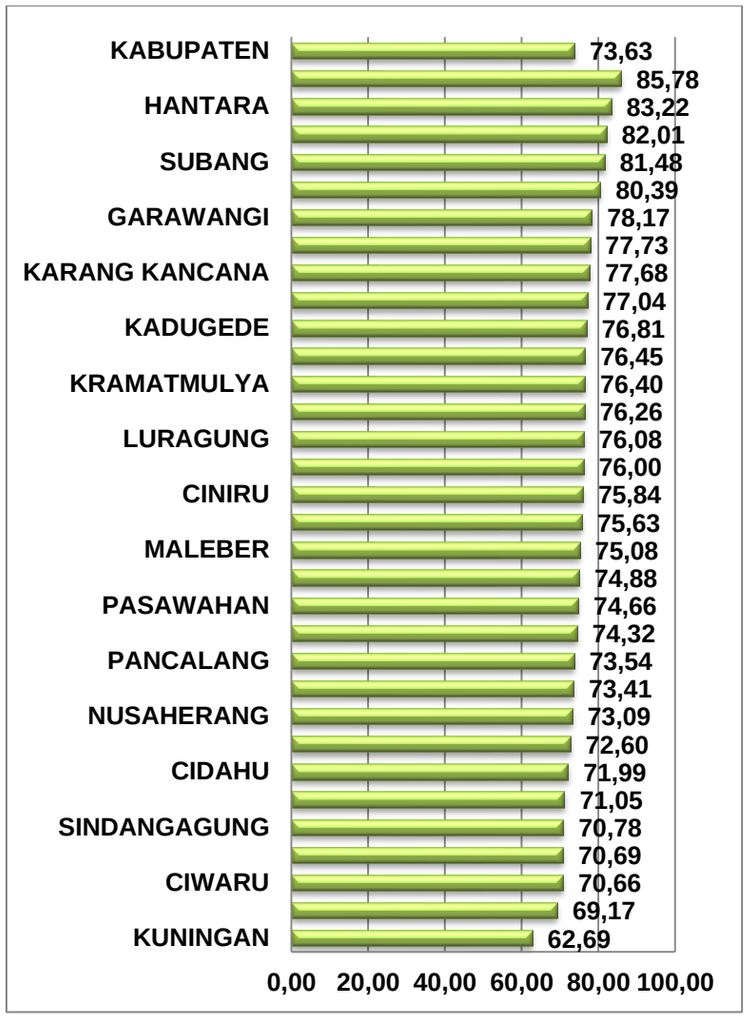

Sumber : DPPKBP3A Kab. Kuningan, 2023 (Aplikasi SIGA)

1) Indeks Pembangunan Manusia

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam permasalahan pembangunan, diperlukan indikator yang representatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam kaitan ini, indikator **Indeks Pembangunan Manusia** (IPM**;** *Human Development Index*) merupakan salah satu alternatif yang diajukan. Indikator ini, disamping

mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Index(PPP).*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit atau gambaran gabungan ketiga komponennya, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli Masyarakat. Jadi IPM merupakan suatu ukuran komposit yang mencerminkan tidak hanya pendapatan, tapi juga harapan hidup dan pencapaian bidang pendidikan.

Dalam konteks peningkatan derajat kesehatan misalnya, upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan balita secara bertahap masih menjadi prioritas, begitu pula pada penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan.

Di bidang pendidikan, penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan *drop out* murid sekolah (mempertahankan agar anak tetap bersekolah), dan pendidikan luar sekolah tetap dan harus mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung- gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai daya beli masyarakat, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatur penyediaan barang publik (alokasi), mengurangi inflasi dan pengangguran (stabilisasi), melaksanakan pemerataan (keadilan sosial) atau distribusi pendapatan melalui upaya pengembangan usaha skala mikro untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal.

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal, yaitu 100 (seratus). Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall*, semakin cepat peningkatan IPM.

Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Kuningan mencapai 70,99 poin meningkat dari tahun 2022 yang mencapai 70,16 poin, sehingga termasuk dalam capaian IPM dengan kategori tinggi (berada dalam interval di atas 70 dan di bawah 80).

Tabel 3.6
Capaian IPM dan Komponennya
di Kabupaten Kuningan, Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH)	73,35	73,59	73,78	74,03	74,29
Indeks Kesehatan	81,89	82,45	82,74	83,12	84,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,38	7,57	7,80	7,88	7,89
Indeks Pendidikan	58,12	59,18	59,97	60,27	60,36
Pengeluaran per Kapita Setahun (ribu rupiah)	9.637	9.459	9.409	9.620	10.011
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,10	69,38	69,71	70,16	70,99

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

2) Pencapaian Angka IPM Kecamatan

Pencapaian angka IPM Kabupaten Kuningan tentunya tidak terlepas dari capaian angka IPM kecamatannya. Jika diperhatikan capaian IPM kecamatannya, terjadi pergeseran peringkat walaupun masih pada kisaran satu sampai dua tingkat. Perubahan ini tentunya disertai adanya perubahan kondisi sosial ekonomi di masing-masing wilayah. Pemahaman kita tentang perubahan posisi antar kecamatan dari tahun ke tahun, bukan berarti kecamatan ini lebih baik atau lebih maju dibanding kecamatan lainnya. Akan tetapi perlu kita amati secara

komprehensif bahwa perubahan atau pergeseran tersebut diakibatkan dari ketersediaan program dan anggaran yang ada di masing-masing kecamatan yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan perbaikan ekonomi penduduknya. Secara mutlak tidak dapat ditegaskan pula bahwa program-program yang berkaitan dengan pembangunan manusia akan serta merta meningkatkan komponen-komponen pembangunan manusia itu sendiri, tanpa adanya kesadaran dan kesiapan penduduknya untuk melakukan berbagai program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan dan perbaikan ekonomi. Dengan kata lain bahwa kesinambungan antara program-program yang akan dijalankan dalam rangka pembangunan manusia dengan sumber daya manusia yang ada, baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima program tersebut, perlu terjalin dengan baik sehingga menghasilkan capaian pembangunan manusia yang diharapkan.

5. Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting penentu daya saing suatu daerah, namun pengertian sumber daya manusia tidak dalam artian jumlah, tapi lebih pada kualitas. Inilah yang menjadi penjelas mengapa daerah dengan sumber daya manusia yang tersedia melimpah namun tidak mempunyai daya saing yang tinggi, karena kualitasnya yang masih rendah. Keadaan SDM suatu daerah dapat dilihat dari kondisi Indeks Pendidikan, Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan angka beban ketergantungan (ABT) di daerah tersebut.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama

sekolah. Capaian indeks Pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan. Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2023 adalah sebesar 60,36.

Indeks Pendidikan Daerah yang dibentuk berdasarkan pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah (HLS) tercatat sebesar 12,26 tahun pada 2023. Ini berarti anak- anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga jenjang SMA. Di sisi lain, pencapaian indikator Rata-rata lama sekolah masih jauh tertinggal dari standar maksimumnya yang sebesar 15 tahun, dengan capaian Tahun 2023 masih di angka 8 tahun. Sarana pendidikan yang masih kurang memadai ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan beberapa penyebab belum terealisasinya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.

Angka rasio ketergantungan (ABT) daerah relative cukup tinggi cukup tinggi, yaitu 46,32 pada Tahun 2023. Artinya tiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 46 hingga 47 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Ketersediaan lapangan kerja dan skill masih menjadi penyebab utama tingginya ABT ini. Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu daerah besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Daerah Tahun 2023 adalah sebesar 61,95 persen. Berdasarkan capaian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat masih rendah (kriteria BPS >64,13% = tinggi; <64,13% = rendah) angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 61 sampai 62 orang angkatan

kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja.

Berdasarkan perpres nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, daerah menjadi bagian dari pengembangan wilayah tersebut. Kawasan ini diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Di kawasan ini sedang dibangun kawasan industri berteknologi tinggi yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 4,49 juta orang. Tentunya harus menangkap peluang tersebut, pembangunan SDM berdaya saing dan berkualitas menjadi kuncinya.

Dalam mewujudkan SDM berdaya saing dan berkualitas, akan didorong kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat yang meliputi peningkatan kualitas sekolah vokasi melalui pemenuhan sarana dan prasarana SMA dan SMK, serta meningkatkan SDM vokasi untuk menyiapkan angakatan kerja yang siap kerja.

Tabel 3.7
Indeks Pendidikan, TPAK, dan Rasio Beban Ketergantungan
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	58,21	59,18	59,97	60,27	60,36
TPAK	61,20	61,98	68,32	61,80	61,95
ABT(Rasio Beban Ketergantungan)	n/a	50,89	46,40	46,55	46,32

Sumber: BPS Kab. Kuningan dan Disdikbud Kab. Kuningan, 2024

Sebagai penunjang untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas kondisi pendidikan daerah terus mengalami perbaikan dari waktu ke

waktu, terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan hingga akses masyarakat terhadap pendidikan. Berikut adalah data-data terkait dengan sektor pendidikan.

Tabel 3.8
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2019-2023

No.	Informasi Demografi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	**Penduduk Usia Sekolah**	99,86	99,98	99,71	N/A	
1	7 - 12 Tahun	99,82	99,85	99,86	99,90	99,91
2	13 - 15 Tahun	89,29	89,20	89,15	94,25	94,85
3	16 - 18 Tahun	75,39	75,50	75,20	N/A	
B.	**Angka Putus Sekolah (APS)**					
	SD/MI/Sederajat	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	SMP/MTs/ Sederajat	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15
C.	**Angka Partisipasi Murni (APM)**					
	SD/MI/Sederajat	99,88	99,89	99,80	99,90	99,90
	SMP/MTs/ Sederajat	91,21	91,22	91,80	93,25	93,87
	SMA/SMK/MA/Sederajat	66,79	64,73	67,61	66,86	70,96
D.	**Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%)**	97,84	98,56	97,50	98,03	98,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kuningan, 2023, BPS Kuningan Dalam Angka,2024

Angka partisipasi Murni penduduk sudah terbilang tinggi untuk jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat. Hal ini menggambarkan kesadaran akan Pendidikan dasar yang sudah baik, namun masih terbilang rendah untuk jenjang SMA/SMK/MA Sederajat. Hal ini harus menjadi perhatian Bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena kewenangan SMA/SMK/MA/sederajat ada di pihak Provinsi.

Tabel 3.9
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD**					
	Jumlah Guru	6.628	5.872	5.942	5.995	6.939

	Jumlah Murid	102.147	100.375	99.384	98.354	96.947
	Rasio	1:0.065	1:0.059	1: 0.060	1:0.061	1:0,072
2	**SMP**					
	Jumlah Guru	2.427	2.348	2.460	2.416	2.674
	Jumlah Murid	40.480	40.078	40.430	40.310	40.688
	Rasio	1:0,060	1:0.059	1: 0.061	1:0.060	1:0,66

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2024

Rasio guru dan murid masih harus ditingkatkan, yaitu rata-rata 1:0,060 yang artinya rata-rata 1 orang guru mengampu 15 orang murid. Namun penting dilihat lebih jauh soal sebaran guru, apakah sudah terdistribusi secara adil untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang ada, terutama antara desa dan kota.

Data menunjukan, angka putus sekolah dasar (SD/MI) sampai dengan Tahun 2023 mencapai 0,01 persen. Untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah Tahun 2019 sebanyak 0,17 persen, capaian kondisi di akhir Tahun 2023 adalah 0,15 persen.

Tabel 3.10
Persentase Angka Putus Sekolah
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kuningan , 2024

Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Tabel 3.11
Angka Kelulusan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sekolah Dasar (SD/MI)	100	100	100	100	100
2.	Sekolah Menengah	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pertama (SMP/MTs)					

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, angka kelulusan sekolah dasar (SD/MI) dan Pendidikan sekolah menengah pertama yaitu sebesar 100 persen untuk setiap tahunnya.

6. Kesehatan

Kesehatan secara komprehensif meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, sehingga sektor kesehatan juga harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya keempat jenis tindakan tersebut. Dalam bidang kesehatan, beberapa ukuran yang digunakan untuk melihat kualitas kesehatan yang ada, meliputi: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka usia harapan hidup, angka balita gizi buruk, dan jumlah fasilitas kesehatan.

1) Angka Kematian Bayi

Kasus kematian bayi trennya fluktuatif, dengan kematian 69 bayi di Tahun 2019 naik menjadi 152 kematian bayi pada Tahun 2023, Hal ini masih menjadi perhatian bersama *stakeholders* pembangunan bidang Kesehatan. Perkembangan angka kematian bayi tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Angka Kematian Bayi, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bayi Lahir Hidup	19.454	19.315	18.493	16.573	15.855
2	Kematian Bayi per Tahun	69	80	102	89	152

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2024

Tingginya angka kematian bayi, memberikan gambaran tentang pentingnya memperhatikan persoalan akses dan kualitas kesehatan guna meminimalisir kejadian tersebut.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Tercatat masih terdapat angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Di Tahun 2023 mengalami penurunan, menjadi 21 kasus. sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Angka Kematian Ibu, Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Kematian Ibu(kasus per 100 ribu)	23	27	49	24	21
Jumlah Ibu Hamil/melahirkan	19.454	19.315	18.493	16.880	16.800

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Kuningan, 2024

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Angka gizi buruk terus mengalami penurunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Angka Gizi Buruk, Tahun 2019-2023

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Gizi Buruk (%)	0,67	0,71	0,50	4.30	0,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2023

7. Pembangunan Keluarga

a. Aspek Sosial

Berdasarkan UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga, ditetapkan tujuan pembangunan keluarga sejahtera adalah untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Konsep keluarga sejahtera menurut

undang-undang tersebut adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan BKKBN merumuskan keluarga sejahtera adalah: (1) keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama, (2) keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga, (3) keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.

Dengan demikian secara ringkas pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, sesuai tujuan pembangunan keluarga di dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

b. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Konsep status kawin disini meliputi belum kawin, kawin, dan cerai. Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

1) Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin. Bagi daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan

pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program program pelayanan keluarga.

2) Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian angka perkawinan umum ini mempunyai tingkat pendekatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan angka perkawinan kasar, karena hanya membandingkan penduduk yang berpotensi untuk kawin yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka perkawinan umum di Kabupaten Kuningan yaitu sebesar 7,61. Angka ini berarti bahwa di Kabupaten Kuningan dari 1.000 penduduk terdapat 7-8 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 7-8 kali terjadi peristiwa perkawinan. Angka perkawinan umum tertinggi di Kabupaten Kuningan berdasarkan kecamatan terjadi di Kecamatan Pasawahan yaitu sebesar 10,57. Sementara Kecamatan Hantara memiliki angka perkawinan umum yang terendah sebesar 3,43.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Kepala keluarga menurut konsep demografi merupakan seorang laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, social, maupun secara psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

d. Kekerasan pada Anak dan Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat

kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya. Padahal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya.

Kabupaten Kuningan masih menghadapi tantangan serius terkait kekerasan pada perempuan. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa kasus, data terbaru tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa jenis kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak dan kekerasan fisik. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak mencatat peningkatan yang cukup mencolok, dari 27 kasus pada tahun 2022 menjadi 44 kasus pada tahun 2023 , sementara kekerasan fisik juga meningkat dari 18 kasus pada tahun 2022 menjadi 30 kasus pada tahun 2023 seperti yang terlihat pada tabel 3.15. Perlunya perhatian serius dari pihak berwenang dan masyarakat dalam melindungi perempuan serta anak-anak dari risiko kekerasan.

Tabel 3.15
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Kuningan, Tahun 2023

No	Laporan Pengaduan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Kekerasan					
			Dewasa	Anak	L	P	Disabilitas Anak	Disabilitas Perempuan
1	**Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**							
	a. Fisik	18	13	5	-	18	-	-
	b. Psikis	6	3	3	1	5	-	-
	c. Seksual	11	3	8	-	11	-	-
	d. Penelantaran	4		4	2	2	-	-
	e. Trafficking (TPPO)	-	-	-	-	-	-	-
2	**Kekerasan Diluar Lingkungan Keluarga**							
	a. Fisik	12	4	8	4	8	-	-
	b. Psikis	2	2		-	2	-	-
	c. Seksual	33	3	30	-	33	2	1
	d. Penelantaran	3	1	1	-	3	-	1
	e.	1	1	-	-	1	-	-

No	Laporan Pengaduan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Kekerasan					
			Dewasa	Anak	L	P	Disabilitas Anak	Disabilitas Perempuan
	Trafficking/TPPO							
3	**ABH**	37	-	37	29	8	-	-
4	**Perkawinan Anak**	6	-	6		6	-	-
5	**Hak Asuh Anak**	3	3		1	2	-	-
6	**Kenakalan Remaja/ Tawuran**	21	-	21	19	2	-	-
7	**NAPZA**	-	-	-	-	-	-	-
8	**LGBT**	4	1	3	-	4	-	-
9	**Konsultasi**	14	9	5	2	12	-	-
	Total	**175**	**43**	**131**	**58**	**117**	**2**	**2**

8. Ekonomi

a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun - 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Indikator ketenagakerjaan berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Kelompok umur produktif secara ekonomis, yaitu kelompok umur 15-64 tahun di Kabupaten Kuningan mencapai 50,84 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Artinya, sekitar 25,42 persen penduduk Kabupaten Kuningan terkategori tidak produktif secara ekonomis dari kelompok umur muda (0-14 tahun) dan tua (65 tahun ke atas).

Grafik 3.4
Jumlah Penduduk Umur Produktif
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan
Tahun 2019-2023

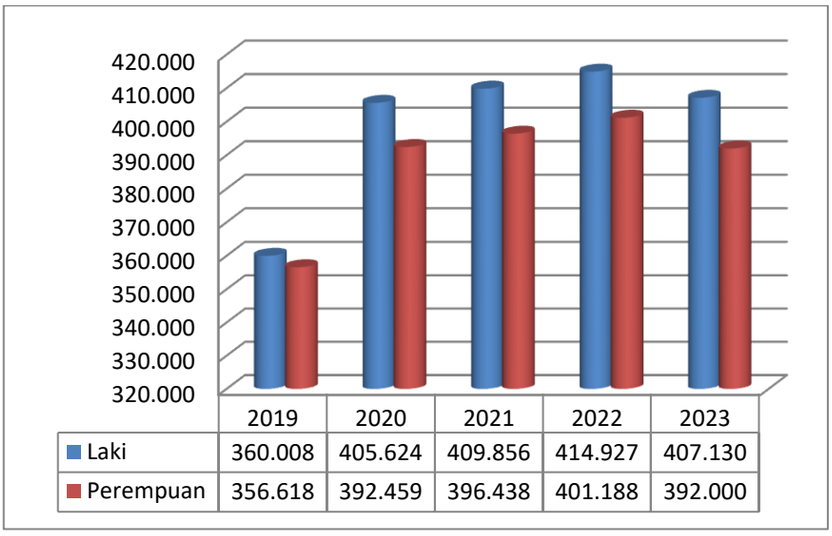

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran, 2024

Grafik diatas memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) di Kabupaten Kuningan secara keseluruhan, baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan usia produktif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan cenderung relatif kecil dan konsisten. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 artinya semakin menurun penduduk produktif di Kabupaten Kuningan yang dibebani tanggung jawab untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktiflagi.

Tabel 3.16
Penduduk Kabupaten Kuningan Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Jenis Kelamin	Kegiatan Utama							
		Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	
1	Laki-laki	345.408	37.475	382.883	38.397	16.349	29.886	84.632	467.515
2	Perempuan	174.250	17.036	191.286	35.458	223.268	9.259	267.985	459.271
	Kab.Kuningan	**519.658**	**54.511**	**574.169**	**73.855**	**239.617**	**39.145**	**352.617**	**926.786**

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

Grafik 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kuningan
Tahun 2023

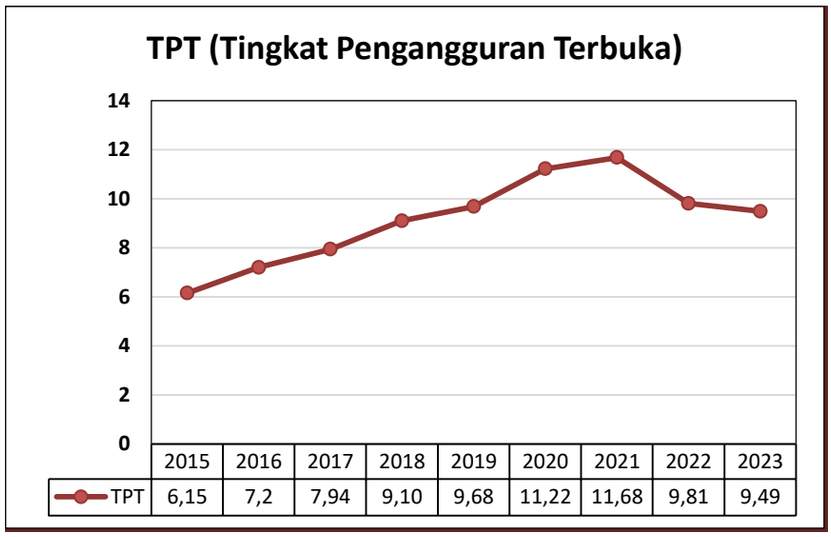

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dengan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja.

Berdasarkan grafik di atas bahwa nilai TPT Kabupaten Kuningan selama delapan tahun terakhir mengalami tren kenaikan dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 11,68% yang naik sebanyak 0,46% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 TPT Kabupaten Kuningan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 1,87% dari 11,68% menjadi 9,81%. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 9,49%.

Grafik 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin

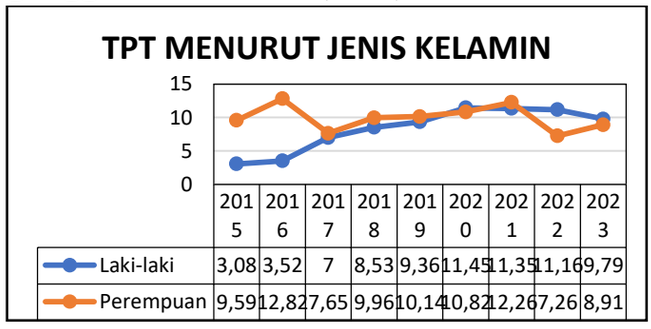

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

Dilihat menurut jenis kelamin, tampaknya pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan cenderung mengalami fluktuasi selama 2019-2023. Laki-laki memiliki tingkat pengangguran lebih rendah dibandingkan perempuan, salah satu penyebab tingginya angka TPT perempuan dibanding laki-laki diduga karena aspirasi penduduk perempuan dalam hal mencari kerja berkurang.

Grafik 3.7
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2018 – 2023

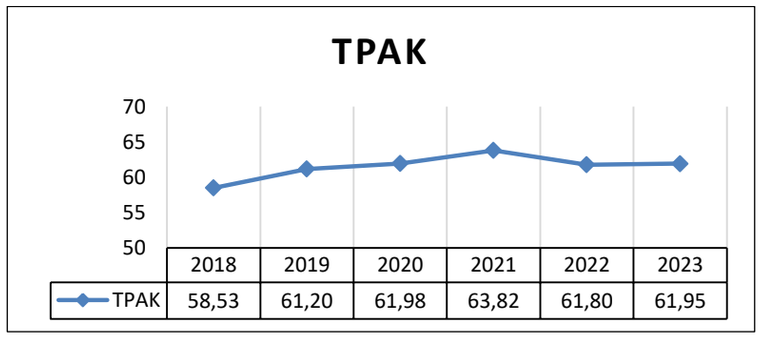

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas).

Semakin besar angka TPAK maka semakin besar pula kesempatan bagi mereka yang tergolong angkatan kerja untuk mendapatkan lapangan usaha/pekerjaan. Karena dalam kelompok angkatan kerja, selain mereka yang belum memperoleh pekerjaan atau menganggur juga sudah terdapat mereka yang telah bekerja pada lapangan usaha/pekerjaan tertentu. Besaran TPAK ini pula memberikan peluang dalam memperoleh output yang semakin besar pada suatu kegiatan perekonomian

Berdasarkan grafik di atas bahwa nilai TPAK Kabupaten Kuningan selama lima tahun terakhir mengalami trend naik. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 63,82% yang naik sebanyak 1,84% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Kuningan mengalami penurunan yang cukup

signifikan yaitu dari 63,82% menjadi 61,95% sehingga banyak terjadi pengangguran.

Tabel 3.17
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	112,506	24,79	132,775	28,67	122,675	25,59	124,864	26,08	122,675	25,
Industri Pengolahan	92,299	20,34	82,046	17,71	89,297	18,63	91,979	19,21	89,297	18,
Jasa	248,976	54,87	248,343	53,62	267,433	55,78	261,917	54,71	267,433	55,
Jumlah	**453,781**	**100**	**463,164**	**100**	**479,405**	**100**	**478,760**	**100**	**479,405**	**1**

Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2023

Letak geografis wilayah Kabupaten Kuningan di kaki Gunung Ciremai sangat cocok untuk usaha di sektor pertanian karena lahan yang subur dan ketersediaan air yang melimpah, sehingga lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Kuningan masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2023, dari total penduduk Kabupaten Kuningan yang bekerja, sebanyak 25,59 persen bekerja di sektor pertanian, angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2022 yang mencapai 26,08 persen. Salah satu penyebab penurunan pada sektor pertanian ini adalah akibat adanya perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut memberikan dampak besar bagi keberlangsungan pada sektor pertanian.

Sedangkan lapangan pekerjaan di sektor jasa merupakan terbanyak kedua setelah sektor pertanian, yaitu proporsinya sebanyak 55,86 persen pada penduduk Kabupaten kuningan tahun 2023 yang bekerja di bidang jasa, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 54,71% dibandingkan tahun 2021.

Tabel 3.18
Penduduk Kabupaten Kuningan Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu
Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama
Tahun 2023

No.	Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh / Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tak dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)
1	Laki-laki	73.027	40.291	12.350	81.964	90.851	10.757	309.240
2	Perempuan	44.584	17.643	2.101	42.805	26.523	36.509	170.165
	Kab. Kuningan	**117.611**	**57.934**	**14.451**	**124.769**	**117.374**	**47.266**	**479.405**

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

9. Data Dan Administrasi Kependudukan

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimana dalam UUD RI Tahun 1945 (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal itu menunjukkan konstitusi telah memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Konsekwensinya institusi pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang dapat di akses oleh publik.

Ketersediaan data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyakut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan.

Sejalan dengan itu, perkembangan kependudukan dan pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional atau daerah dapat

berjalan dengan baik. Data kependudukan yang diolah dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang pembangunan kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Saat ini Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Kuningansudah dilakukan walaupun banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaannya terutama dalam up dating data penduduk setiap tahunnya. Selain itu keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menangani SIAK ini menjadi permasalahan tersendiri. Cat : Insert data Adminduk 2014

a. Kondisi harapan

1) Kuantitas Penduduk

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan 2005-2025, pembangunan manusia Kuningandiarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat Kuningan juga merupakan masyarakat yang memiliki jatidiri yang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional.

Misi ini didasari oleh prediksi jumlah penduduk Kuningan dalam dua puluh tahun mendatang diperkirakan mencapai 52 juta jiwa dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1.6%. Dalam kurun waktu jangka panjang, kondisi yang diharapkan adalah penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban bagi pembangunan di Kuningan. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang, diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,11 per perempuan Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan pada tahun 2025. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,03 pada tahun 2030 dan 2 pada tahun 2035.

Proyeksi penduduk Kabupaten Kuningan dari tahun 2005 – 2025 dengan Metode Komponen (BPS, BAPPENAS dan UNFPA, 2006). Asumsi-asumsi yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Asumsi TFR pada periode proyeksi untuk tahun 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 dan 2020-2025, 2025-2030 dan 2030-2035 bertuurt-turut adalah TFR=2,341, TFR=2,218, TFR=2,147, TFR=2,106 TFR=2,1 dan 2. Pada tahun 2005-2010 diasumsikan bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang ibu pada akhir masa reproduksinya adalah 2,218 orang. Trend TFR penduduk Kabupaten Kuningan yang diasumsikan oleh BPS, seperti pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.8
Trend TFR Kabupaten Kuningan

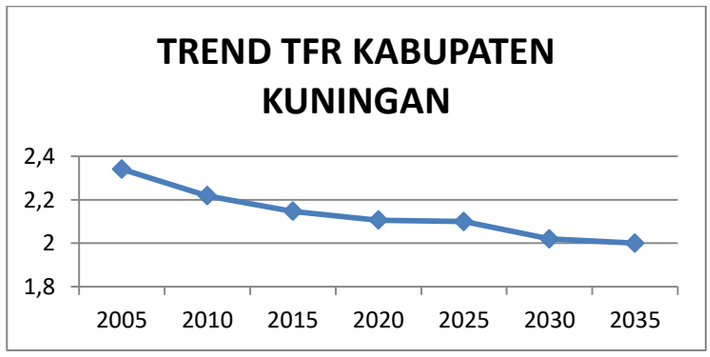

Sumber : BPS, BAPPENAS dan UNFPA, 2006

b. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah AKB (Angka Kematian Bayi) pada periode proyeksi untuk tahun 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 dan 2020-2025, 2025-2030 dan 2030-2035 berturut-turut adalah AKB=42, AKB=32, AKB=25, AKB=21 AKB=17 dan 15. Angka kematian ini diasumsikan terus turun, dengan makin mambaiknya tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Kuningan.

c. Asumsi migrasi sama denga pola tahun dasar yaitu pola migrasi berdasarkan data SP 2000. Pola migrasi yang dipakai adalah pola migrasi risen tahun 1995-2000 dan dihitung ASNMR (Age specific Net Migartion Rate) menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

d. Asumsi TFR pada periode proyeksi untuk tahun 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 dan 2020-2025, 2025-2030 dan 2030-2035 bertuurt-turut adalah TFR=2,341, TFR=2,218, TFR=2,147, TFR=2,106 TFR=2,1 dan 2. Pada tahun 2005-2010 diasumsikan bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang ibu pada akhir masa reproduksinya adalah 2,218 orang. Trend TFR penduduk Kabupaten Kuningan yang diasumsikan oleh BPS, seperti pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.8
Trend TFR Kabupaten Kuningan

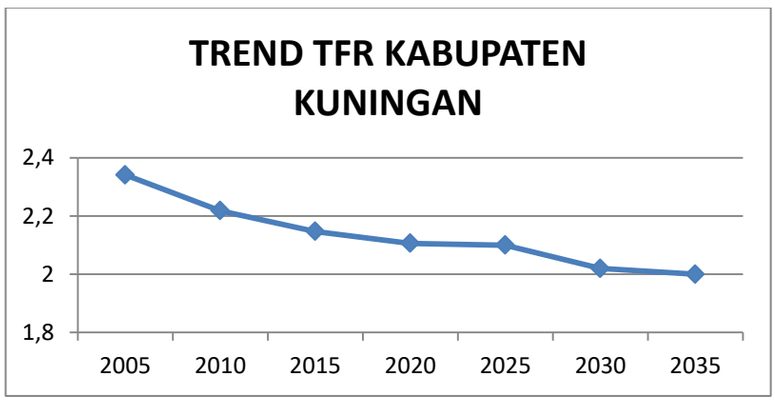

Sumber : BPS, BAPPENAS dan UNFPA, 2006

e. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah AKB (Angka Kematian Bayi) pada periode proyeksi untuk tahun 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 dan 2020-2025, 2025-2030 dan 2030-2035 berturut-turut

adalah AKB=42, AKB=32, AKB=25, AKB=21 AKB=17 dan 15. Angka kematian ini diasumsikan terus turun, dengan makin mambaiknya tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Kuningan.

f. Asumsi migrasi sama denga pola tahun dasar yaitu pola migrasi berdasarkan data SP 2000. Pola migrasi yang dipakai adalah pola migrasi risen tahun 1995-2000 dan dihitung ASNMR (Age specific Net Migartion Rate) menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 3.19
ASNMR Penduduk Kabupaten Kuningan

UMUR	ASNMR W	ASNMR L
0- 4	0.0022	0.0038
5 -9	0.0021	0.0037
10-14	0.0017	0.0026
15-19	0.0024	0.0031
20-24	0.0047	0.0085
25-29	0.0042	0.0063
30-34	0.0044	0.0091
35-39	0.0028	0.0069
40-44	0.0022	0.0046
45-49	0.0019	0.0042
50-54	0.0018	0.0028
55-59	0.0015	0.0037
60-64	0.0013	0.0033
65-69	0.0014	0.0026
70-74	0.0015	0.0030
75 +	0.0021	0.0052

Sumber : BPS RI, 2010

2) Kualitas Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar di Kabupaten Kuningan harus diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik agar tidak menjadi beban pembangunan di kemudian hari. Melalui perbaikan sarana dan prasarana kesehatan terutama terhadap akses dan mutu kesehatan, diharapkan angka kematian di Kuningan terus menurun dan angka harapan hidup terus meningkat. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang selama ini menjadi penyumbang

terbesar bagi angka kematian di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2025 diharapkan menurun menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup dan terus menerus secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035 menjadi sekitar 12 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup di Kabupaten Kuningan diharapkan meningkat menjadi 74,9 tahun pada tahun 2035.

Selain aspek kesehatan, pendidikan menjadi salah satu indicator tercapainya sumberdaya manusia yang terampil dan berdayasaing. Pada tahun 2025, diharapkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kuningan adalah 9 tahun dan terus meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2035.

Tabel 3.20
Dependency Ratio dan AKH

Indikator Kualitas penduduk	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Dependency Ratio	0.51	0.48	0.46	0.47	0.47	0.46
AKH	68.2	70.7	71.6	72.5	73.4	74.3

Sumber : BPS RI, 2010

Faktor lainnya yang menentukan untuk dijadikan sebagai ukuran kualitas penduduk adalah dependensi rasio dan angka harap mencapaan hidup (AKH). Ukuran ini merupakan ukuran yang juga digunakan dalam perhitungan IPM dan MDG's. Dimana harapan angka dari hasil perhitungan untuk Kabupaten Kuningan adalah 0,46 pada tahun 2035 untuk dependency rasio dan 74,3 untuk AKH. Lihat tabel diatas.

3) Persebaran Dan Mobilitas Penduduk

Harapan di tahun 2035, penduduk Kabupaten Kuningan tersebar seimbang di seluruh Kecamatan baik di pusat kota maupun desa atau daerah penyangganya sesuai potensi daerah masing masing dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan.

Kebijakan pengendalian penduduk harus memperhatikan dampak terhadap pergerakan penduduk dalam melakukan migrasi atau urbanisasi. Selain itu, pada tahun 2025 telah dimulai terjadinya keseimbangan antara migrasi masuk dan keluar sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk. Kondisi migrasi yang diharapkan adalah terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pusat kotayang saat ini menjadi magnet paramigran sehingga persebaran penduduk menjadi seimbang sesuai dengan daya dukung dan potensi.

4) Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang member corak pada masyarakat dan didalamnya dikembangkan sumber daya manusia. Melalui keluarga banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih baik.Untuk itu, pendekatan keluarga dalam kegiatan pembangunan menjadi sangat penting.Keluarga berperan dalam pendidikan dan menjadi komponen utama dalam tumbuh kembang anak yang sejalan dengan fungsi-fungsi keluarga:

Melalui pendekatan keluarga, yang termasuk kedalam pembangunan kependudukan dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah penderita penyakit HIV/AIDS atau TB atau mal nutrisi; penanggulangan masalah social seperti kenakalan remaja, narkoba dan penanggulangan akibat bencana. Oleh karenanya, diharapkan pada tahun 2035, keluarga di Kabupaten Kuningan bisa memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologi dan ketahanan social budaya yang mumpuni sehingga mampu melahirkan sosok manusia yang berkualitas tinggi dan menjadi bagian dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan. Kondisi diatas dapat dilihat dari indicator.

5) Data Dan Informasi Kependudukan

Kondisi harapan dari pembangunan data dan informasi kependudukan adalah tersusunnya sistem database kependudukan yang handal sehingga dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang akurat, riil dan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan secara tepat.

10. Analisis pembangunan kependudukan

a. Analisis Kuantitas Penduduk

Kondisi Kabupaten Kuningan yang beragam dalam besaran densitas penduduk membuat ketimpangan distribusi penduduk telihat semakin besar dalam sepuluh tahun terakhir. Berbagai kecamatan memiliki pertumbuhan penduduk yang rata-rata lebih besar dari pertumbuhan penduduk di kecamatan yang ada. Pergerakan penduduk yang masuk ke wilayah perkotaan juga menunjukkan tren meningkat yang cukup signifikan. Sementara daerah pedesaan memiliki stock penduduk yang relatif stagnan atau bahkan berkurang.

Tabel 3.21
Pertumbuhan Penduduk

Tahap	Tingkat Fertilitas	Tingkat Mortalitas	Pertumbuhan Alami
1. Stabil tinggi	Tinggi	Tinggi	Nol atau sangat rendah
2. Perkembangan	Tinggi	Turun	Lambat
3. Perkembangan akhir	Turun	Turun lebih cepat	Pesat
4. Stabil rendah	Rendah	Rendah	Nol, atau sangat rendah
5. Menurun	Rendah	Lebih tinggi daripada kelahiran	Negatif

1) Keadaan I

Angka kematian turun lebih dahulu akibat peningkatan pembangunan dan teknologi, misalnya di bidang kesehatan, lingkungan, perumahan dan lain-lain. Kondisi ekonomi makin membaik akibat pembangunan

dan pendapatan penduduk meningkat sehingga kesehatan semakin baik. Akibatnya tingkat kelahiran tetap tinggi (makin sehat) tetapi angka kematian menurun (akibat kesehatan dan lain- lain). Pada kondisi ini akan terasa tingginya laju pertumbuhan penduduk alami, seperti dialami Kabupaten Kuningan pada periode tahun 2010 sampai 2020 dengan angka pertumbuhan 1,33 % per tahun.

2) Pada Keadaan II

Terjadi perubahan akibat pembangunan dan juga upaya pengendalian penduduk. Maka sikap terhadap fertilitas berubah menjadi cenderung mempunyai anak lebih sedikit, sehingga turunnya tingkat kematian juga diikuti turunnya tingkat kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tidak tinggi lagi. Penurunan angka kelahiran di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan menjalankan program KB atau Keluarga Berencana. Dalam menjalankan program KB, digalakan juga pemakaian alat kontrasepsi sehingga angka kelahiran bisa ditekan. Itu menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan mempunyai kebudayaan atau gaya hidup sebagai masyarakat modern. Jadi Kuningan masih menjalani proses menuju kondisi stabil sesuai alur yang disepakati diteori transisi demografi. Semakin berkembangnya jaman, kebiasaan memiliki banyak anak mulai ditinggalkan, proses industrialisasi sudah semakin membaik, dan angka kelahiran sudah cukup berhasil ditekan. Keadaan tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan penduduk Kuningan periode 1980 sampai 2010 yang turun menjadi 1,9%.

3) Pada Keadaan III

Bila penurunan tingkat kelahiran dan kematian berlangsung terus menerus, maka akan mengakibatkan pertumbuhan yang stabil pada tingkat yang rendah. Kabupaten Kuningan sedang menuju/mengharap tercapainya kondisi ini yaitu penduduk bertambah sangat rendah atau tanpa pertumbuhan. Tidak mustahil

beberapa waktu yang akan datang Kabupaten Kuningan akan mencapai keadaan yang stabil dan meyelesaikan transisi demografi.

Walaupun jumlah penduduk Kabupaten Kuningan secara umum menunjukan jumlahnya semakin meningkat, namun selama kurun waktu antara tahun 2010 – 2022 pertumbuhan penduduk di Kuningan memperlihatkan adanya trend penurunan dalam pertumbuhannya.

b. Analisis Kualitas Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, komposisi penduduk Kabupaten Kuningan terdiri dari 29 persen (0-15 tahun) merupakan penduduk usia muda, sebesar 66 persen (15-64 tahun) penduduk usia produktif, serta 5 persen (lebih dari 64 tahun) merupakan penduduk usia tua. Hal ini menggambarkan bahwa transisi demografi di Kuninganmenuju pada surplus penduduk usia produktif.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan, bahwa kondisi surplus penduduk usia produktif akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan proyeksi tersebut, mulai tahun 2010 jumlah komposisi penduduk di Kabupaten Kuningan akan didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu kelompok umur 15–64 tahun. Sebaliknya penduduk usia muda cenderung mengalami penurunan dan penduduk usia tua meningkat.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kuningan sampai dengan tahun 2030 akan mengalami surplus penduduk usia produktif. Surplusnya penduduk usia produktif ini merupakan sebuah potensi dalam pembangunan daerah, sebaliknya menjadi boomerang bila tidak terkelola secara baik khususnya melalui kebijakan pemerintah melalui program pembangunan daerah.

Tabel 3.22
Proyeksi Komposisi Penduduk di Kabupaten Kuningan
Tahun 2010 – 2030

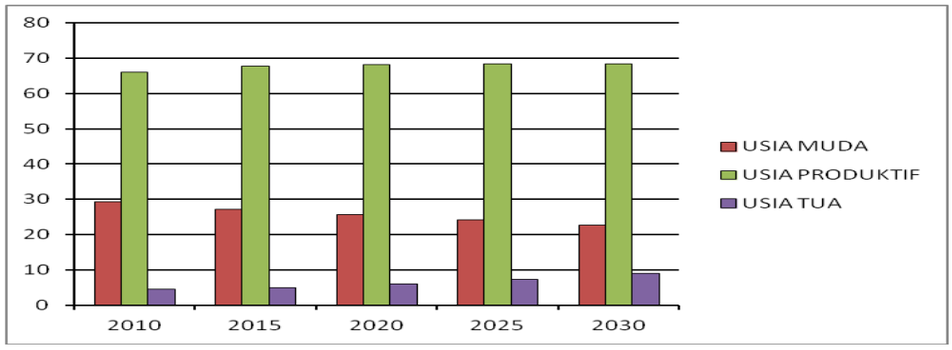

TAHUN	2010	2015	2020	2025	2030
USIA MUDA	29.26	27.17	25.74	24.29	22.61
USIA PRODUKTIF	66.14	67.74	68.22	68.33	68.41
USIA TUA	4.6	5.08	6.03	7.38	8.98

Sumber : BAPPEDA Kab. Kuningan, 2010

Meningkatnya pertumbuhan penduduk usia produktif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Terjadinya transisi demografi yang ditandai dengan semakin menurunnya angka kelahiran dan kematian penduduk;
b. Membaiknya tingkat kesehatan dan akses pelayanan dibidang kesehatan;
c. Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk;
d. Meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat;
e. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan penduduk utamanya melalui program keluarga berencana dan pembinaan kesejahteraan sosial misalnya PKK; dan

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, dalam konteks pembangunan berbasis sumber daya manusia (people centre development), indikator yang penting adalah kualitas penduduk. Hal ini karena tingginya jumlah penduduk usia produktif tidak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah jika tidak diimbangi dengan kualitasnya. Kualitas penduduk tidak hanya kualitas pada kesehatan dan membaiknya income percapita saja, namun dalam jangka

panjang pendidikan dan keterampilan menjadi faktor dominan dalam pembangunan daerah.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kuningan secara nasional, sampai dengan tahun 2022 menempati urutan ke 5 di Provinsi Jawa Barat dan Ke 16 dari seluruh Provinsi di Indonesia dan berada dibawah IPM nasional. Walaupun demikian, tiap periode indeks tersebut terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan modal dasar bagi pembangunan di Kabupaten Kuningan melalui pembangunan berbasis kependudukan (Demografi Based of Development) terutama dalam menyiapkan transisi demografi yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif.

Bonus demografi merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. Menyikapi bonus demografi maka penurunan fertilitas memberikan probabilitas terhadap peningkatan kesejahteraan karena adanya bonus demografi tersebut. Demographic divident atau demographic gift memberikan sumbangan terhadap penurunan Dependency Ratio. Hal ini dikarenakan tenaga produktif bebannya terhadap tenaga non produktif akan semakin kecil. Kondisi tersebut memberikan dampak berupa beban terhadap pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Dependency Ratio Kabupaten Kuningan masih tergolong cukup tinggi, beban yang harus ditanggung oleh kelompok penduduk produktif secara ekonomis. Bahkan angka ketergantungan yang diperoleh Kabupaten Kuningan berada diatas angka Kuningandan Nasional. Ini suatu tantangan agar penduduk yang tergolong nonproduktif (kelompok umur muda dan tua) lebih diminimalisir jumlahnya, sehingga laju pertumbuhan pembangunan manusia dan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan lebih pesat.

c. Analisis SWOT Menghadapi Bonus Demografi

Menyikapi adanya Bonus Demografi di Kabupaten Kuningan , secara sederhana dapat dilakukan analisa melalui analisis SWOT dengan melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang terhadap pembangunan daerah. Adapun analisis tersebut sebagai berikut:

Matrik Analisis SWOT

STRENGTH :	**WEAKNESSES :**
➢ IPM yang relatif meningkat dari tahun ke tahun ➢ Angka Dependency Ratio Menurun ➢ Adanya transisi demografi	➢ Rata-rata tingkat pendidikan penduduk masih rendah ➢ Terbatasnya pasar tenaga kerja pada sektor industri ➢ Masih banyaknya jumlah penduduk miskin ➢ Masih terjadinya kesenjangan antar daerah
OPPORTUNITIES :	**THREATS :**
➢ migrasi antar daerah di Kuningantidak permanen ➢ banyaknya tersedia lembaga pendidikan dan kesehatan d Kuninganseba gai infrastruktur untuk pembangunan manusia ➢ Sumberdaya alam menjadi modal dasar dalam menggali potensi lokal ➢ Peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat	➢ Daya saing penduduk masih rendah ➢ Banyaknya Pencemaran lingkungan ➢ Kepadatan penduduk relative tinggi dan semakin meningkat ➢ Kecenderungan semakin rendahnya kesadaran tentang Keluarga Berencana (KB) ➢ Perkawinan usia dini relatif tinggi sehingga menurunkan produktivitas

Selanjutnya strategi dalam memanfaatkan bonus demografi agar mempunyai dampak positif dalam

pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan diantaranya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
b. Penyiapan lapangan pekerjaan.
c. Menjaga stabilitas ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang berbasis kependudukan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
d. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengendalian jumlah penduduk
e. Kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar, keterbukaan perdagangan dan saving nasional.
f. Kebijakan yang mendorong munculnya wirausaha muda dan memberdayakannya untuk mendukung pembangunan nasional.

Strategi termaksud diharapkan mampu memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan melalui keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri (Wirausaha). Penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya (pertanian, industri kreatif serta industri mikro, kecil dan menengah).

d. Analisis Pembangunan Keluarga

Jumlah penduduk mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian IPM. Pada gilirannya, jumlah penduduk akan mempengaruhi pembangunan keluarga. Sejak awal masyarakat dihadapkan kepada hipotesis program KB akan mampu memangkas dengan cepat kemiskinan di satu daerah. Dengan kata lain, program KB merupakan alternatif yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Hal itu bisa terjadi dikarenakan bahwa program KB bukan saja masalah konstrasepsi tetapi disetai pula dengan program-program pemberdayaan masyarakat.

Model kemiskinan itu biasanya dikaitkan dengan kemiskinan yang persisten atau kemiskinan warisan. Keluarga miskin cenderung akan menikah dengan keluarga miskin, dan mempunyai anak yang miskin. Benang merah

ini sulit diputus dan ditembus. Maka, ketika muncul begitu banyak analisis yang mengedepankan hubungan antara program KB dengan kemiskinan memberikan tekanan tentang pernyataan tersebut.

Kuningan mempunyai penduduk tertinggi di Indonesia dengan tingkat IMP yang relatif rendah. Data BKKBN (2010) tentang kemiskinan (Pra-KS) di Kuningan menurun, walaupun relatif kecil. Sementara pada saat yang sama peserta KB disini semakin membaik. Bahkan dalam program KB Jabar dari rangking 27 secara nasional naik menjadi rangking 3. Ini merupakan pertanda, secara perlahan Kabupaten Kuningan mulai bangkit membangun pembangunan keluarga melalui KB.

Kabupaten Kuningan merespons baik pembangunan keluarga ini, dengan meluncurkan Perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Perda yang diluncurkan bertepatan dengan deklarasi keluarga Indonesia di Bogor (Juni 2014), seiring dengan begitu besarnya tantangan pembangunan saat ini. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan adanya Perda ketahanan keluarga, maka fungsi fungsi keluarga akan berjalan dengan baik. Dalam Perda itu, telah dimasukkannya delapan fungsi keluarga yakni :

(i) Keagamaan,
(ii) Sosial budaya,
(iii) Cinta kasih,
(iv) Perlindungan,
(iv) Reproduksi,
(v) Sosialisasi dan pendidikan,
(vii) Ekonomi, dan
(viii) Pembinaan lingkungan.

Menyadari pentingnya program Keluarga Berencana di Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan ketahanan keluarga, maka PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), yang semula hanya ada di tingkat Propinsi (Juli 2012), kini di Kabupaten Kuningan telah ada tempat pelayanan terpadu program kependudukan dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Kehadiran PPKS di Kabupaten Kuningan untuk menjadi “garda terdepan” palayanan program KB, yang pada gilirannya mendongkrak pencapaian peserta. Inisiatif ini dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Kuningan. program KKBPK dan pihak ketiga dari unsur masyarakat. Saat yang sama, program Genre (Generasi Berencana) dan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan), dan BKB (Bina Keluarga Balita) terus digalakkan agar ketahanan keluarga ditengah situasi ekonomi yang kurang baik bisa ditingkatkan.

11. Analisis Distribusi, Struktur dan Transisi Demografi

Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang dialami oleh suatu daerah, di satu sisi akan berdampak positif berupa penyediaan jumlah sumberdaya manusia yang memadai, peluang permintaan terhadap barang dan jasa yang semakin tinggi, dan terkelolanya potensi sumberdaya yang tersedia sehingga menjadi efektif, namun di sisi lain akan berdampak negatif dalam pembangunan. Hal ini mempunyai arti dan makna yang cukup mendalam, oleh karena penduduk disamping sebagai pelaku (subject) juga merupakan tujuan (object) dari pada pembangunan. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Keadaan kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, seringkali peran penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Oleh karenanya, pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Mengingat betapa kompleksnya permasalahan kependudukan, maka salah satu tujuan

dilaksanakannya pembangunan kependudukan adalah untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Adanya laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, akan menimbulkan implikasi negatif yang cukup luas terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, diantaranya adalah gangguan lingkungan oleh karena daya dukung alam yang tidak memadai dan tidak disesuaikan, semakin tingginya jumlah penganggur sehingga menambah jumlah kemiskinan dan timbulnya berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti tindak kriminal, gelandangan, pengemis, dan sebagainya, serta berbagai permasalahan lainnya yang multidimensional, cenderung merugikan pembangunan itu sendiri dan mengancam keberlanjutannya.

Menurut teori neo klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi, Pembentukan modal memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat. Namun yang menjadi persoalan selama ini adalah terjadinya paradoks dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kuningan, di mana kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa angkatan kerja yang meningkat pesat diimbangi juga dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang bertambah besar.

Struktur dan distribusi penduduk menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan dan kabupaten/kota. Arahan pembangunan yang berdasarkan kepada masing-masing visi dan misi daerah janganlah menimbulkan problema kependudukan yang baru. Singkronisasi pencapaian pembangunan haruslah berbasis kepada seberapa besar input faktor yang dilihat dari struktur dan distribusinya dapat mendukung pembangunan itu sendiri. Kemampuan proses pembanngunan dalam menyerap

angkatan kerja menjadi pekerja dengan basis pengembangan aksesibilitas penduduk pada ekonomi sektoralnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Kuningan dalam menyelesaikan transisi demografinya :

a. Tidak meratanya pembangunan, masih ada daerah primitif dengan gaya hidup yang masih sederhana. Disisi lain, pembangunan dan proses industrialisasi terus berkembang.
b. Pendidikan masih perlu di tingkatkan dan diratakan. Salah satu faktor penentu pertumbuhan adalah pendidikan wanita. Pendidikan masyarakat yang tinggi juga akan merangsang pemikiran masyarakat untuk mempunyai gaya hidup modern.
c. Agraris, mungkin salah satu faktor penyebab sulitnya Kuningan berubah menjadi daerah Industri secara merata karena sebagian besar masyarakat adalah petani.
d. Transisi demografi di Kabupaten Kuningan menuju pada surplus penduduk usia produktif. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan bahwa kondisi surplus penduduk usia produktif akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan tahun 2030. Surplusnya penduduk usiaproduktif ini merupakan sebuah potensi dalam pembangunan daerah, sebaliknya menjadi boomerang bila tidak terkelola secara baik khususnya melalui kebijakan pemerintah melalui program pembangunan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk

PROGRAM	KEGIATAN
Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduks
	Penyediaan penyelenggaraan pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal
	Penyediaan peta perkiraan pengendalian penduduk tingkat Kabupaten/Kota
	Penyediaan data dan informasi berbasis keluarga
Keluarga Berencana	Pengelolaan Promosi kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
	Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Lini Lapangan
	Pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan pelayanan KB
	Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB
Upaya Kesehatan	Penyediaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan daerah
	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) rujukan daerah
Sumber Daya Kesehatan	Pengendalian praktek tenaga kesehatan
	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk UKP dan UKM

Idealnya, dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan

sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stabil. Searah dengan kebijakan Pemerintahan Pusat, untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,26 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan tahun 2020. Untuk sampai pada TFR 2,1 tentunya berat bagi Kab. Kuningan sehingga pada tahun 2025 masih mentargetkan TFR 2,11.

Di samping itu, dari sisi perubahan komposisi penduduk menurut umur, sama halnya dengan kondisi Kabupaten Kuningan berada pada fase ketika rasio ketergantungan mencapai angka terendah, yaitu kurang dari 43,28 % pada tahun 2022. Kondisi ini penting karena akan memberi kesempatan bagi Kab. Kuningan untuk mencapai bonus demografi. Salah satu tandanya adalah dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai puncak, yaitu kira-kira 66,73 persen dari jumlah penduduk. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat, maka tahap tersebut akan tertunda atau bahkan hilang sama sekali.

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka pengendalian kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran. Oleh karena itu, pelaksanaan Program KB masih sangat relevan. Pada prinsipnya, pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur (1) usia ideal perkawinan, (2) usia ideal melahirkan, (3) jarak ideal melahirkan, dan (4) jumlah ideal anak yang dilahirkan. Orientasi pelaksanaan Program KB perlu diarahkan pada upaya pemenuhan hak reproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima melalui program KB. Secara prinsip program KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan, (2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan, (4) peningkatan kesertaan KB pria, serta (5) promosi pemanfaatan air susu ibu.

Efektivitas pelaksanaan Program KB perlu didukung dengan : (1) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah, (2) larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM, (3) pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan, serta (4) perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu juga ditopang oleh penurunan angka kematian. Adapun prioritas upaya dapat difokuskan pada: (1) penurunan angka kematian ibu hamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan anak.

Strategi pengendalian kuantitas penduduk

a. Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari supply ke demand side approach;
b. Memperkuat kelembagaan, penguatan SDM lembaga, memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur, mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah;
c. Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan mutual benefits.
d. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal dan nasional;
e. Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

Disahkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan dasar untuk melakukan revitalisasi kebijakan

kependudukan di Indonesia. Dari sisi kelembagaan, UU tersebut memberikan kesempatan yang besar untuk mengelola kebijakan kependudukan secara memadai. Sedangkan kelembagaan di daerah nama dan bentuk struktur merujuk pada Undang-Indang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah hasilnya Kabupaten Kuningan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan SK Bupati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kelembagaa Pada Dinas Instansi Kabupaten Kuningan.

Kabupaten Kuningan juga menghadapi persoalan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut (ageing population) yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya tingkat ketergantungan penduduk. Untuk mengatasi persoalan ini, kebijakan yang ditempuh adalah dengan, perpanjangan masa usia kerja dapat menjadi alternative kebijakan. Untuk menunjang strategi tersebut, perlu didukung oleh program perbaikan kesehatan bagi penduduk usia lanjut. Strategi ini berpotensi untuk mengurangi tingkat ketergantungan penduduk juga pada akhirnya.

Menurut Easterlin, tingkat fertilitas sebagiannya ditentukan oleh karakteristik latar belakang seperti persepsi nilai anak, agama, kondisi pemukiman, pendidikan, status kerja, umur kawin pertama, pendapatan, kematian bayi/anak. Setiap keluarga mempunyai norma-norma dan sikap fertilitas yang didasarkan atas karakteristik di atas. Studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kaum perempuan yang tinggi dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat fertilitas, karena perempuan yang lebih lama menghabiskan waktu untuk pendidikan akan memperpendek tahun resiko kehamilan karena menghabiskan periode panjang tahun melahirkan anak di sekolah. Selain itu perempuan berpendidikan tinggi cenderung memilih terjun ke pasar kerja terlebih dahulu sebelum memasuki perkawinan. Pendidikan juga dapat meningkatkan pengetahuan perempuan dalam proses informasi mengenai pilihan fertilitas dan perilaku kehamilan. Efek penting lainnya dari aspek ini adalah semakin baik tingkat pendidikan kaum wanita, maka mereka semakin berpotensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penghasilan keluarga sehingga waktu yang khusus mereka sediakan untuk membesarkan anak

semakin terbatas, dengan sendirinya akan mempengaruhi jumlah anak yang diinginkan.

Lebih lanjut, Leibenstein mengatakan bahwa, mempunyai anak dapat dilihat dari dua segi ekonomi, yaitu segi kegunaan (utility) dan biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk membesarkan dan merawat anak. Apabila ada kenaikan pendapatan orang tua, maka aspirasi untuk mempunyai anak akan berubah, lebih menginginkan kualitas yang lebih baik daripada kuantitas. Oleh karena itu, berbagai program peningkatan penghasilan dan perbaikan ekonomi keluarga berpotensi untuk mengurangi tingkat fertilitas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan dan progam KB tidak dapat berjalan sendirian. Kebijakan dan program tersebut perlu ditopang oleh kebijakan dan program lain, diantaranya yang strategis adalah intensifikasi program-program pengentasan kemiskinan, dan pembedayaan perempuan.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Pengendalian Kualitas Penduduk

PROGRAM	KEGIATAN
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Bidang Kesehatan
Manajemen Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Kurikulum Pendidikan	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perhitungan Kebutuhan, Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Perhitungan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Kualitas Hidup Perempuan	Pengelolaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Perempuan dan Pelembagaan
Perlindungan Perempuan	Pengelolaan Upaya Perlindungan Perempuan
Kualitas Keluarga	Pengelolaan Kesehatan Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5).

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Strategi penting yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Intensifikasi penyelenggaraan pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi perlu terus dilakukan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya.

Dari sisi pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen. Untuk terus meningkatkan capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Kuningan sudah mencapai (98,29%) pada tahun 2023 yang tidak hanya bisa dilakukan hanya dengan upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih 7,88% pada tahun 2018. Sudah saatnya prioritas pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan pengembangan pendidikan nonformal maupun informal untuk mencapai hasil yang maksimal. Meningkatkan kegiatan belajar masyarakat dan pelatihan/pendidikan non formal bagi warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidup.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) berbeda antara perkotaan dengan perdesaan, dimana APS perkotaan lebih baik dari perdesaan. Demikian halnya dengan APS Perempuan lebih tinggi dari pada APS Laki-laki. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) juga masih 80%. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin dan juga segmen masyarakat berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Rendahnya APS dan APK juga berkait erat dengan permasalahan sosial, termasuk nilai anak di mata orang tua. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa bekerja membantu dan meringankan orang tua dipandang lebih baik daripada sekolah. Anak dianggap sebagai barang investasi atau aktiva ekonomi, yaitu orang tua berharap kelak menerima manfaat ekonomi dari anak. Manfaat ini akan nampak jika anak bekerja tanpa upah di sawah atau usaha milik keluarga atau memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua ataupun membantu keuangan keluarga. Kondisi permasalahan ini jelas memerlukan terpaan kebijakan dan program yang berbeda. Kondisi ini juga mengisyaratkan perlunya penanganan yang

lintas sektoral terutama terkait program-program pengentasan kemiskinan sehingga keluarga miskin akan memperoleh kesempatan untuk dapat mendorong anaknya untuk sekolah ketimbang memintanya untuk bekerja. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan akar permasalahan mendasar yang telah menguatkan persepsi nilai anak seperti itu.

Fakta menunjukkan bahwa di wilayah perdesaan lebih banyak anak tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi karena cukup sulit mengakses SMA di wilayah perdesaan. Pada umumnya SMA hanya terdapat di ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten sehingga biaya sekolah untuk transportasi dan asrama meningkat bagi siswa dari perdesaan yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA. Sementara itu, untuk partisipasi sekolah pada penduduk usia 19-24, perbedaan antara perdesaan dan perkotaan juga cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pembangunan sekolah menjadi pilihan yang strategis. Perbaikan infrastruktur lainnya seperti akses jalan menuju sekolah perlu terus dilakukan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degenratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan treatment penyakit tersebut. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayanan prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan. Akan tetapi, dengan memerhatikan diversitas kondisi kesehatan antar daerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi, sekali lagi, tidak dapat bersifat homogen

atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah.

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya (1) penurunan angka kematian ibu hamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian ini dilakukan melalui upaya yang proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian perlu ditopang oleh prinsip (1) kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri), (2) keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan, (3) pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta (4) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui delapan fokus prioritas. Pertama, peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui: (a) peningkatan pelayanan continuum care kesehatan ibu dan anak; (b) penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED dan PONEK; (c) peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; (d) peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); (e) peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (f) peningkatan cakupan penanganan komplikasi kebidanan pelayanan nifas; (g) peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah; (h) pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK; (i) peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; (j) peningkatan cakupan kunjungan bayi; (k) peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; (l) perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; (m) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (n) peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; (o) penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader); dan (p) perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.

Kedua, perbaikan status gizi masyarakat dengan meningkatkan: (a) asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka kecukupan gizi; (b) survailans pangan dan gizi; (c) pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; (d) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (e) pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK; (f) pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama; (g) kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; (h) fortifikasi; (i) pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang; (j) penanggulangan gizi darurat; (k) tatalaksana penanganan gizi buruk anak balita (0–59 bulan); dan (l) peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat.

Program-program pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek dan peningkatan peran dan tanggungjawab kaum pria dalam hal peningkatan kesehatan reproduksi, dapat juga menjadi alternatif program yang strategis.

Pada akhirnya, angka kematian diharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2010-2020 diharapkan akan menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035 menjadi sekitar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup juga meningkat dari 72,62 tahun tahun 2015 menjadi 74,95 tahun tahun 2035.

Dari sisi ekonomi, terkait dengan kebijakan pendidikan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja. Karena persoalan pemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan penting di Indonesia, maka strategi untuk mengatasi masalah tersebut yang harus menjadi prioritas.

Arah pembangunan ekonomi dapat ditujukan pada beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi perdesaan
2. Penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Pertanian, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan di wilayah-wilayah strategis;
3. Menyediakan sarana informasi dan fasilitasi pemasaran dalam rangka pengembangan produk – produk unggulan daerah.
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kemudahan birokrasi dan jaminan berinvestasi
5. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha–usaha berbasis ekonomi kerakyatan.
6. Menciptakan ketahanan pangan melalui ketersediaan akses pangan masyarakat yang berkualitas dan beragam

Pemenuhan Prasarana dan sarana memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Ketersediaan SDA dan SDM yang besar tanpa didukung oleh ketersediaan Prasarana dan Sarana akan membuat proses pembangunan berjalan kurang optimal (lamban). Prasarana dan sarana yang utama antara lain penyediaan jalan dan jembatan, irigasi dan sarana air bersih, ketersediaannya dapat menunjang kelancaran proses pembangunan secara umum di samping ketersediaan berbagai prasarana dan sarana lainnya seperti telekomunikasi dan transportasi.

3. Pembangunan Keluarga

Tabel 4.3
Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga

PROGRAM	KEGIATAN
Pembangunan Keluarga Sejahtera	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Peningkatan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Sosial	Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Akses Pemenuhan Hak Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	Perlindungan dan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin
	Penjaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma bagi Korban Bencana

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Sebagian besar keluarga Indonesia masih belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Pokok-pokok pembangunan keluarga memuat pokok-pokok kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa; membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari pokok kegiatan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Strategi pembangunan keluarga yang dapat dilakukan adalah:

a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal.
b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut: meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui: peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.
d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan Negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti

penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

4. Mobilitas Dan Persebaran Penduduk

Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga

PROGRAM	KEGIATAN
Penataan Mobilitas Penduduk	Menciptakan Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	Mengendalikan Kuantitas Penduduk di suatu Daerah/Wilayah tertentu serta Mengembangkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
	Melindungi Penduduk yang terpaksa Pindah Karena Keadaan (Pengungsi)
	Penataan Penduduk Non Permanen

Mobilitas penduduk pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni kebijakan ekonomi makro, kebijakan politik nasional, gaya hidup, dan globalisasi. Sementara itu, secara nasional persebaran penduduk melalui transmigrasi kurang memuaskan. Pengembangan transmigrasi pada saat ini lebih bertumpu pada transmigrasi swakarsa dan kerja sama antar daerah yang didukung oleh kebijakan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru tingkat Kecamatan.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kuningan adalah masih banyak penduduk yang berangkat ke kota-kota untuk berusaha (migrasi out).

Untuk mengatasi hal tersebut, maka prinsip pokok pembangunan kependudukan pada penataan persebaran dan pengerahan mobilitas diarahkan pada:

1. Pengarahan bagi warga yang migrasi out didorong dan mendukung pembangunan pembangunan daerah asal;
2. Pembangunan pusat pusat perekonomian baru di wilayah kecamatan baik pertanian atau pariwisata baru.
3. Membuka industri baru dengan syarat ramah lingkungan di Kabupaten Kuningan.

Dengan kata lain, kebijakan yang diterapkan harus berkonotasi tidak secara massal mengatur perpindahan penduduk, tetapi lebih pada 'menjual' daerah dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Penciptaan lapangan kerja, penjaminan iklim usaha yang kondusif, memberikan informasi potensi daerah secara intensif serta menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan untuk bertempat tinggal.

5. Sistem Administrasi Kependudukan

Tabel 4.5
Program dan Kegiatan Pembangunan Data dan Administrasi Kependudukan

PROGRAM	KEGIATAN
Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan Pendaftaran Penduduk
Pencatatan Sipil	Pengelolaan Pencatatan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Data Kependudukan
Profil Perkembangan Kependudukan	Penataan dan Pengelolaan Profil Perkembangan Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swasta yang membutuhkan;
b. Tersusunnya sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat. Strategi yang ditempuh adalah:

a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah dan masyarakat dan dunia bisnis. Dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006. Pada periode ini juga mulai dikembangkan sistem identifikasi pengenal tunggal dengan teknologi biometrik. Pendekatan pengembangan dan penerapan, baik sisi fitur teknologi maupun dari sisi implementasi di lapangan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
b. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.
d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
e. Pengembangan sistem yang telah terbangun dengan tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk

pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan database kependudukan adalah seluruh kabupaten melakukan kegiatan pemutakhiran data. Selanjutnya, melaksanakan penerbitan NIK dan penerapan e-KTP. Yang tidak boleh dilupakan adalah update database kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara regular juga. Terbangunnya database kependudukan berbasis NIK akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Database kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan population mainstreaming. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip people centered development untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pelaksanannya harus mendasarkan pada pendekatanhak asasi. Untuk itu langkah pertama adalah melakukan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakanpembangunan sejak tahap perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi dan monitoring. Kebijakan dan program kependudukan melibatkan banyak sector, sehingga perlu koordinasi yang baik dari berbagai sector serta perencanaan yang matang dan bersifat integral. Dengan memerhatikan bahwa kondisi dari semua aspek di Indonesia tidak homogen, maka disparitas yang terjadi antarprovinsi, terlebih lagi antarkabupaten/kota, harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi. Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di setiap daerah. Oleh karena itu, dalam

menyusun strategi diperlukan mekanisme yang saling melengkapi antara bottom-up dan top-down.

E. *ROADMAP* KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Roadmap *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun waktu 2025 sampai dengan 2045 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Berdasarkan fakta dan kondisi eksisting dari data yang telah dianalisis akan diproyeksikan kondisi obyektif Kabupaten Kuningan 20 tahun ke depan atau rencana Kuningan Tahun 2045. Rencana tersebut mengacu pada arahan 4 skenario awal pembangunan Kabupaten Kuningan yang telah ditetapkan. Rencana berdasar kondisi obyektif Kabupaten Kuningan yang akan diproyeksikan dalam proyeksi jumlah penduduk dengan 3 skenario beserta proyeksi demografi lainnya, seperti struktur umur, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketenagakerjaan, seperti tenaga kerja per sektor, tingkat partisipasi kerja, pengangguran, dan kesempatan kerja tahun 2045.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kependudukan merupakan faktor yang penting sebagai modal dasar pembangunan wilayah. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat dijadikan tolak ukut pembangunan sumber daya manusia, yang berimbas pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi dengan disertai oleh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung dapat berperan pada penciptaan barang dan jasa dalam kegiatan produksi. Di sisi lain kependudukan juga berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan angka kemiskinan, yang dalam hal ini pemerintah daerah setempat dituntut untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan

kemiskinan. Sebagai modal dasar pembangunan yang sifatnya ekstrinsik (tidak nampak), SDM memiliki kecenderungan dapat berubah, artinya kuantitas maupun kualitas penduduk di suatu daerah dapat mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah di bidang kependudukan ataupun faktor lain yang berasal dari luar daerah.

Tabel 5.1

Perbandingan LPE dan LPP Kabupaten Kuningan
Tahun 2020-2045

Tahun	LPE	LPP
2025	5,18-5,71	0.95
2030	5,26-5,97	0.81
2035	5,34-6,22	0.67
2040	5,42-6,48	0.57
2045	3.26-6.79	0.43
Rata-rata		

Sumber : Masterplan Pembangunan Kab. Kuningan (Provinsi) data adop BPS

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mengalami kenaikan disetiap tahunnya pada tahun 2024 dapat mencapai 3,26-6,79.

Jika dilihat dari struktur penduduk menurut usia seperti pada tabel 5.2 dan grafik 5.1 berikut ini terlihat bahwa rata-rata selama 25 tahun ke depan dapat dikatakan struktur penduduk di Kabupaten Kuningan sebagaian besar termasuk kelompok penduduk usia muda yang mengindikasikan jumlah penduduk produktif yang cukup besar yang terkonsentrasi pada penduduk usia muda yang juga mengindikasikan tingginya angka *dependency ratio* yang disebabkan proporsi penduduk yang masuk ke dalam usia kerja produktif (15-64 tahun) memiliki persentase lebih besar dari pada proporsi penduduk non usia kerja (tidak produktif) dan mengindikasikan tingkat kemajuan suaru daerah.

Tabel 5.2
Proyeksi Penduduk menurut Usia Kabupaten Kuningan
Tahun 2045

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Kabupaten (Jiwa/Ha)	Kepadatan Penduduk Permukiman (Jiwa/Ha)	Kebutuhan Lahan Hunian Tidak Bertingkat (Ha)	Kebutuhan Rumah
1	2025	1.225.493	10,26	70,46	12.255	306.373,3
2	2030	1.279.432	10,71	73,57	12.794	319.858
3	2035	1.326.675	11,11	76,28	13.267	331.668,8
4	2040	1.364.720	11,43	78,47	13.647	341.180
5	2045	1.394.061	11,67	80,16	13.941	348.515,3

Sumber : BPS, dianalisis 2023, 1 rumah = 4 orang

Grafik 5.1
Proyeksi Penduduk menurut Usia Kabupaten Kuningan
Tahun 2030

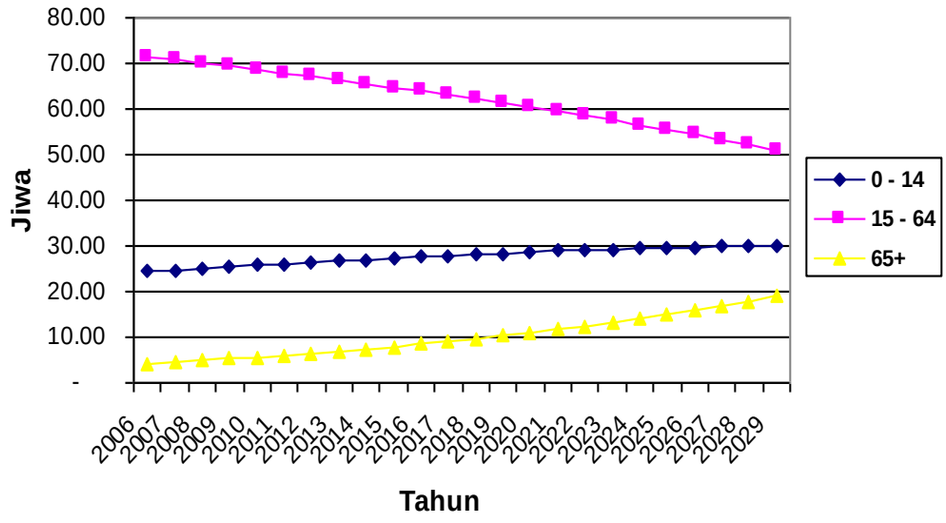

Terkait tentang jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan, ternyata realitas jumlah penduduk masih di bawah proyeksi artinya pertumbuhan terus menurun. Dari perkiraan angka LPP di atas 2,24 tapi hasil sensus 2022 (yang terakhir) LPP kabupaten Kuningan hanya 1,38 artinya secara realitas pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuningan tidaklah menunjukkan ledakan penduduk atau pertambahan yang besar per tahunnya.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini pemerintah mampu mengatasi permasalahan kependudukan

terutama keberhasilan program KB. Sejalan dengan otonomi daerah, maka upaya pengembangan pembangunan berwawasan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan pilihan yang paling tepat.

Searah dengan kondisi ini diharapkan terus berupaya menurunkan TFR, LPP dan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stabil sehingga Kuningan bisa lebih dulu mencapai arah yang sama dengan kebijakan Pemerintahan Pusat.

Kabupaten Kuningan cukup mendekati untuk mencapai bonus demografi. Kuningan mulai pada tahun 2025, 2029, 2030, 2034, 2035, 2039, 2040, 2045. Bonus demografi ini merupakan jendela peluang (window of opportunity) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi ini diperkirakan akan terjadi hanya sekali dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar lima tahun, dari tahun 2025-2045 berdasarkan proyeksi penduduk angka kelahiran dapat dikendalikan. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat, maka tahap tersebut akan tertunda atau bahkan hilang sama sekali.

Tabel 5.3
Roadmap Kondisi Kuantitas Kependudukan Yang Diinginkan

Roadmap 2020-2024	Roadmap 2025-2029	Roadmap 2030-2034	Roadmap 2035-2039	Roadmap 2040-2045
Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS)	Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS)	Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)	Tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)

Tabel 5.4
Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2045

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.39	0.95	0.81	0.67	0.57	0,43
Total Fertility Rate	2.26	2.11	2.03	1.95	1.81	1.70
Contraseptive Prevalence rate	68.40	71.00	72.00	72.58	73.58	74.54
Usia Kawin Pertama Bagi Wanita	18.90	19.60	20.50	21.09	21.82	22.53

Sumber : Bappeda, dianalisis 2024

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisil yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mmiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tabel 5.5
Roadmap Kondisi Kualitas Penduduk Yang Diinginkan

Roadmap 2020-2024	Roadmap 2025-2029	Roadmap 2030-2034	Roadmap 2035-2039	Roadmap 2040-2045
Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas terciptanya good governance	Peningkatan kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif di semua sektor	Terwujudnya kualitas penduduk yang bertakwa, maju, mandiri, sejahtera, kreatif dan inovatif di berbagai sektor

Tabel 5.6 di bawah adalah target rata-rata lama bersekolah untuk jangka waktu lima tahunan secara nasional, pada tahun 2035 diharapkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kuningan dapat mencapai 12,00 tahun.

Tabel 5.5
Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS)

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2020	7,57	8,00	8,32
2025	7,91	8,35	8,78
2030	8,23	8,86	8,89
2035	8,54	9,40	10,30
2040	8,86	10,95	11,60
2045	9,11	12,00	12,00

Sumber : Bappeda, dianalisis 2024

Mengacu kepada perkiraan capaian secara nasional. skenario rendah dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen. Skenario sedang dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 1,5

persen per tahun dan scenario tinggi tanpa asimtot seperti pada tabel 5.7.

Tabel 5.6
Scenario Asimtot APM (Angka Partisipasi Murni)

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2020	56,2	60,7	56,6
2025	60,7	66,6	63,1
2030	64,8	71,7	70,4
2035	68,4	76,0	78,5

Sumber : Bappeda, dianalisis 2024

Sesuai acuan nasional, skenario rendah menggunakan model asimtot 80 tahun berdasarkan asumsi dari AHH negara-negara *very high developed* saat ini adalah sebesar 80 tahun.

Tabel 5.7
Perkiraan Angka Harapan Hidup

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2020	70,1	70,3	75,2
2025	70,5	70,8	75,27
2030	70,8	71,3	76,25
2035	71,1	71,7	77,24
2040	71,4	72,2	78,22
2045	71,7	72,6	79,01

Sumber : Bappeda, dianalisis 2024

3. GNI per Kapita (Purchasing Power Parity/PPP)

Skenario rendah menggunakan model asimtot 10.000 berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP$ rata-rata dunia saat ini adalah sebesar 10.000 per kapita PPP$ (HDR 2011). Skenario sedang menggunakan model asimtot 12.000 tahun berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP$ negara Eropa dan Asia Tengah saat ini adalah sebesar 12.000 per kapita PPP$ (HDR 2011). Skenario tinggi menggunakan tren (model tanpa asimtot) (lihat Tabel 7).

Tabel 5.8
Perkiraan GNI per Kapita Indonesia

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2020	5.332	5.846	5.002
2025	6.042	6.783	5.900
2030	6.645	7.577	6,959
2035	7.155	8.250	8.209

Sumber : Bappeda, dianalisis 2024

Tabel 5.9
Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap menurut Indikator dan Parameter
Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Kuningan

	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target PROVINSI		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
TRANSFORMASI SOSIAL				**TRANSFORMASI SOSIAL**			**TRANSFORMASI SOSIAL**		
	Kesehatan untuk Semua			**Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua**			**Peningkatan kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDM**		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75.29	80.78	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,27	79,01
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	15	a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	25	3
b.	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5	b. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	20,51	5,40
							c. Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran	4,25	2,88
				Penanganan Tuberkulosis:	91	100	Penanganan Tuberkulosis:		

3	Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (*treatment coverage*) (%)*			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (*treatment coverage*) (%)*	91	98
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*) (%)*	91	100	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*) (%)*	91	98
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	98	99.5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	89.31	99.5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	94,79	99
	(%)			(%)			(%) (Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/KIS)		
	Pendidikan Berkualitas yang Merata			**Pendidikan Berkualitas yang Merata**			**Peningkatan pendidikan Untuk penguatan daya saing SDM**		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran					
a.	Rata-rata nilai PISA			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:	22,25 – 24,25	71,81 – 73,81			
	- Membaca	396	485	i. Literasi Membaca	1,70 – 3,70	65,20 – 67,20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (point)	6,9LPP	8

	- Matematika	404	490	ii. Numerasi					
	- Sains	416	487						
				b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:	35,55 – 37,55	71,42 – 73,42			
				i. Literasi Membaca	19,34 - 21,34	63,01 - 65,01			
				ii. Numerasi					
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.46	12	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 – 9,53	12,05 – 12,09	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,91	8,11
c.	Harapan lama sekolah	13.37	14.81	d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,37	13,47
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33.94	60	Proporsi Penduduk Berusia15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9.64	9,64 – 14,50	Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	79,02	81,95

7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61.87	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63.3	75			

4. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.11
Roadmap Pembangunan Keluarga

Roadmap 2020-2024	Roadmap 2025-2029	Roadmap 2030-2034	Roadmap 2035-2039	Roadmap 2040-2045
Terwujudnya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan dan perbaikan kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terwujudnya kondisi keluarga yang berkualitas dengan ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, agamis dengan jumlah anak ideal (2) dalam keharmonisan, adil dan berkesataraan gender	Peningkatan kondisi keluarga yang berkualitas dengan ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, agamis dengan jumlah anak ideal (2) dalam keharmonisan, adil dan berkesataraan gender	Terwujudnya keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, berkualitas, berkeadilan dan berkesetaraan gender serta berdaya saing

Tabel 5.10
Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Keluarga
Kabupaten Kuningan
Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	2025-2045	
		Target			Target PROVINSI			Target KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
IE3	**Perlindungan sosial yang adaptif**			**Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju**			**Peningkatan ketahanan sosial masyarakat**		
1	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46	0,09 -0,34	Tingkat Kemiskinan (%)	10,42 - 11,50	0,16-1,05
2	Cakupan kepesertaan Jaminan social ketenagakerjaan (%)	44.1	99.5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,42	44,72
3	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sector formal (%)	20	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70			

5. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Menyangkut aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata setiap kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke kota yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya.

Tabel 5.13
Roadmap Kondisi Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan yang Diinginkan Kabupaten Kuningan

Roadmap 2020-2024	Roadmap 2025-2029	Roadmap 2030-2034	Roadmap 2035-2039	Roadmap 2040-2045
Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah kecamatan	Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah kecamatan sesuai dengan potensi, data dukung social dan lingkunganny a.	Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembanga n kecamata	Peningkatan penyediaan berbagai fasilitas social, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksika n sebagai kecamatan pengembangn kota baru.	Terwujudnya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan harmonis.

6. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi empat periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses

Adapun pentahapannya dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 5.14
Roadmap Pembangunan Database Kependudukan

Roadmap 2020-2024	Roadmap 2025-2029	Roadmap 2030-2034	Roadmap 2035-2039	Roadmap 2040-2045
Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Terwujudnya pelayanan prima administrasi kependudukan.	Terwujudnya kondisi masyarakat berbasis database dn informasi kependudukan	Terwujudnya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu data base dan bisa diakses masyrakat	Terwujudnya pendayagunaan data dan infromasi kependudukan sebagai system pendukung keputusan (DSS)

Tabel 5.15
Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Database Kependudukan Kabupaten Kuningan

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Indikator Kualitatif						
Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep Government to Government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah Government						

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
to Citizen (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006. Pada periode ini juga mulai dikembangkan sistem identifikasi pengenal tunggal dengan teknologi biometric						
Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.						
Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-						

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.						
Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.						
Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan						
Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.						
Indikator Kuantitatif						
Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa akte kelahiran	65	70	80	90		

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase penduduk menguasai akses database	30	40	50	60		

7. Implikasi Kebijakan

Permasalahan kependudukan merupakan permasalahan wajib yang harus menjadi priorotas program dan kegiatan pemerintah daerah di Kabupaten Kuningan. Selain itu, menjadi penting peranan pengeluaran pemerintah perkapita urusan kesehatan, hal lain yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor indikator pembangunan di Kabupaten Kuningan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan pembangunan kependudukan yang ditujukan untuk lebih meningkatkan peranan faktor-faktor yang terkait didalamnya dengan harapan akan dapat memberikan solusi. Kebijakan yang dapat ditetapkan antara lain adalah sebagai berikut.

8. Kebijakan Pembiayaan

Dalam konteks peningkatan indikator pembangunan kependudukan, upaya secara bertahap dapat menjadi prioritas, dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk serta administrasinya. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan pemenuhan pembiayaan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai baik di tingkat kabupaten/kota, dan juga provinsi. Peningkatan pembiayaan untuk pembangunan sarana dan prasarana merupakan motor ini dapat memperbesar keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan serta kelurga berencana dan lembaga institusi masyarakat yang diharapkan mampu menghasilkan masyarakat yang berkualitas, yang pada akhirnya menuju penduduk yang seimbang di wilayah tersebut.

Koordinasi dengan lintas sektor yang berkaitan semisal sektor yang berhubungan dengan tata kota, pembangunan jalan, penyedia perumahan, atau penyedia air bersih dan yang lainnya; perlu terus ditingkatkan untuk bersama-sama

meningkatkan pembangunan kependudukan. Sebagai contoh, infrastruktur di kebanyakan kab/kota di Provinsi Jawa Barat terutama jalan-jalan di pedesaan masih banyak yang kondisinya rusak sehingga menghambat kelancaran akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini mengakibatkan terlambat ditanganinya persalinan yang beresiko yang bisa menyebabkan kematian bayi. Untuk itu diperlukan peran berbagai pihak demi kelancaran transportasi untuk akses pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Agar pembiayaan ini mampu mengatasi masalah yang ada, maka harus dimulai dengan perencanaan yang tepat sasaran, memiliki target yang jelas dan terukur, tidak 'tumpang tindih', serta menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai.

9. Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan

Untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau perlu diterapkan beberapa prioritas kebijakan, baik pengembangan dari kebijakan yang sudah ada maupun penerapan kebijakan baru. Perluasan akses pelayanan kesehatan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa perluasan akses dapat dilakukan melalui keterjangkauan dari segi biaya, kecukupan pengetahuan, maupun keterjangkauan dari segi jarak tempuh ke fasilitas kesehatan.

Guna meningkatkan keterjangkauan dari segi biaya, hendaknya pemerintah melakukan pembebasan retribusi terhadap fasilitas kesehatan yang kemudian diikuti dengan jaminan kesehtan yang lebih baik dan meluas, terutama untuk masyarakat kurang mampu yang menggunakan fasilitas kesehatan. Peningkatan pengetahuan masyarakat juga antara lain dapat diupayakan melalui bantuan para kader kesehatan. Perlu diterapkan suatu kebijakan untuk memantapkan upaya revitalisasi Posyandu melalui pemberian penghargaan berupa insentif bagi para kader kesehatan. Kemudian, karena wilayah Kabupaten Kuningan luas dan memiliki kondisi geografis beragam, maka diperlukan upaya prioritas pada daerah-daerah yang memiliki persebaran penduduk yang cukup tinggi, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan pemerataan

persebaran tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Pada wilayah dengan geografis yang sulit, perlu upaya yang serius untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

10. Peningkatan Pendidikan Perempuan

Mengingat pentingnya peran ibu dalam kelangsungan hidup bayi, dan sebagai ujung tombak pembangunan keluarga, diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan yang lebih berpihak pada perempuan. Misalnya, memberikan akses yang lebih mudah pada penduduk perempuan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, memprioritaskan beasiswa pada penduduk perempuan, memperbanyak muatan kurikulum yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah yang dalam penerapannya melibatkan tenaga kesehatan, dan mengaktifkan kembali kegiatan penyuluhan oleh tenaga kesehatan terutama kepada perempuan usia reproduksi.

11. Kebijkan Keluarga Berencana Sebagai Basis Pembangunan Keluarga

Desentralisasi merupakan proses transfer otoritas dan kewenangan perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan dari pengendali organisasi di tingkat atas kepada tingkat yang ada di bawahnya. Pentingnya pelaksanaan desentralisasi program KB selain sebagai manifestasi responsibilitas/daya tanggap atas perubahan lingkungan strategis (arus demokratisasi dan HAM serta delegasi kewenangan pemerintahan dalam beberapa bidang), juga sangat penting dalam rangka:

1) mendekatkan pelayanan publik kepada pengguna layanan publik, yaitu warga negara sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan program KB yang bukan hanya sesuai dengan prosedur medis dan operasional lainnya tetapi juga kualitas pelayanan sebagaimana yang dikehendaki publik melalui penciptaan mekanisme dialog/interaksi antara *public servant* dengan *citizen*;

2) memeratakan (distribusi) pelayanan program KB sehingga dapat memperkecil kesenjangan akses publik yang berada di daerah tertentu dengan daerah lainnya;
3) memungkinkan diakomodirnya strategi dan cara-cara tetentu dalam operasionalisasi program KB, terutama penggerakkan dalam upaya menciptakan demand terhadap program KB, yang disesuaikan dengan kondisi kesejarahan, kultur, dan geografis setempat;
4) memungkinkan penyelenggaraan program KB yang inklusif dan melibatkan banyak aktor (sektor) sehingga lebih prospektif dalam pencapaian sasaran bersama serta menjadi terintegrasinya program KB dengan program pembangunan lainnya di daerah;
5) efisiensi dalam pendanaan karena operasionalisasi program disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal *(bottom-up) karena berbasis data peserta KB*;
6) memperpendek alur birokrasi sehingga mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan dan mempermudah dalam manajemen supervisi dan informasi dibantu adanya lembaga-lembaga dan pranata sosial yang dimiliki oleh lingkungan KB.

12. Rekapitulasi Roadmap Pembangunan Kependudukan

A. 2020-2024
   1) Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
   2) Pencapaian kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk yang mapan;
   3) Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah kecamatan;
   4) Terciptanya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   5) Terciptanya tertib administrasi kependudukan.

B. 2025-2029
   1) Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS);
   2) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang mapan yang didukung terciptanya *good govemance*;
   3) Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah kecamatan sesuai daya dukung alam dan lingkungan;

4) Peningkatan dan bertambahnya akondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5) Terciptanya pelayanan prima administrasi kependudukan.

C. 2030-2034
1) Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS);
2) Pencapaian kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif;
3) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga;
4) Terciptanya kondisi keluarga yang berkualitas bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak ideal (dua) dalam keharmonisan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender;
5) Tercipta kondisi masyarakat berbasis database dan informasi kependudukan.

D. 2035-2039
1) Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan (PTP);
2) Peningkatan kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif;
3) Peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk;
4) Peningkatan dan bertambahya kondisi keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah ideal dua dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan;
5) Terciptanya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database dan bebas akses.

E. 2040-2045

1) Tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan (PTP);
2) Terwujudnya kualitas penduduk yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kenhinekaan;
3) Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan harmonis;
4) Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas, berkeadilan dan berkesetaraan gender serta berdaya saing;
5) Terciptanya pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung keputusan (DSS).

F. PENUTUP

1. Permasalahan Yang Ada Dan Upaya Yang Dilakukan

a. Permasalahan

1) Sumber informasi kependudukan akurasinya masih perlu ditingkatkan
2) Secara geografis masih ada beberapa wilayah kecil yang masih sulit dijangkau, baik oleh infrastruktur maupun akses dalam pelayanan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga
3) Masih tingginya arus migrasi out sehingga kehilangan potensi SDM yang diperlukan untuk membangun daerah
4) Kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani dan mengerti kependudukan masih kurang.

b. Upaya yang dilakukan

1) Sosialisasi hasil Pendataan Keluarga (PK)
2) Meningkatkan advokasi/KIE kepada unsur pimpinan / para stake holder
3) Menyempurnakan produk hukum dan peraturan-peraturan pendukung
4) Pembinaan kepegawaian / Lini Lapangan
5) Pengembangan bina wilayah program KKBPK secara segmentasi sasaran dan kewilayahan
6) Mengembangkan kemitraan dan kerjasama baru dengan berbagai pihak terkait.

Pj. BUPATI KUNINGAN,

AGUS TOYIB